

BUMI PURA

CITA CITRA GERBANG NEGARA



Kementerian Imigrasi
dan Pemasyarakatan
Direktorat Jenderal Imigrasi

Edisi 02

Volume 13/April 2026
www.imigrasi.go.id/majalah
Majalah Media Keimigrasian



SEMANGAT IMIGRASI UNTUK RAKYAT

Imigrasi memperkuat perannya sebagai penjaga kedaulatan dengan menempatkan rakyat sebagai pusat orientasi. Sinergi pelayanan dan penegakan hukum diwujudkan melalui kebijakan dan inovasi yang adaptif terhadap dinamika global.



Immigration Lounge

Unit layanan keimigrasian yang berlokasi di **pusat perbelanjaan (mal)** untuk memudahkan **pengurusan paspor elektronik**

Daerah Khusus Jakarta

- **Pondok Indah Mall 3**, Lantai B2
- **Mall Taman Anggrek**, Lantai LG
- **Senayan City**, Lantai 6
- **Kebayoran Park Mall**, Lantai UG
- **PIK Avenue Mall**, Lantai 6
- **Lippo Mall Kemang**, Carpark P5B

DI Yogyakarta

- **Sleman City Hall**, Lantai 2

Kepulauan Riau

- **Pollux Mall Batam Center**, Lantai G

Sumatra Utara

- **Immigration Lounge Delipark Medan**, Lantai LM

Jawa Barat

- **Grand Metropolitan Mall**, Bekasi
- **Pesona Square Mall Depok**, Lantai 3

Jawa Tengah

- **Solo Square Mall**, Lantai 1

Jawa Timur

- **Icon Mall Gresik**, Lantai 2F
- **Ciputra World Mall Surabaya**, Lantai 4

Biaya

- Paspor elektronik masa berlaku 5 tahun **Rp650.000**
- Paspor elektronik masa berlaku 10 tahun **Rp950.000**
- Percepatan paspor **Rp1.000.000**





MENATA ARAH, MENGUATKAN IMIGRASI

Salam hangat dari meja redaksi *BhumiPura*! Edisi kali ini hadir dengan semangat “Menavigasi Semangat Imigrasi untuk Rakyat” yang diusung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi yang baru. Tajuk utama tersebut merefleksikan komitmen Imigrasi dalam menghadirkan layanan publik yang inklusif sekaligus responsif terhadap dinamika global.

Dalam rubrik *Laporan Utama* dan *Liputan Khusus*, kami mengulas kesiapan strategis Imigrasi dalam menyambut musim haji 2026—sebuah mandat suci yang menuntut sinergi tanpa celah. Sejalan dengan itu, peran humas sebagai penjaga reputasi institusi turut kami sorot demi meneguhkan narasi positif keimigrasian di mata dunia. Dukungan terhadap sektor prestasi juga kami wujudkan melalui kebijakan jalur khusus bagi atlet asing untuk memperkuat ekosistem olahraga nasional.

Sisi penegakan hukum dalam rubrik *Kerja Kita* menjadi bukti nyata kewaspadaan kami, mulai dari pembongkaran laboratorium narkoba di Gianyar bersama Badan Narkotika Nasional (BNN), pengamanan warga negara asing (WNA) di Palu dan Bogor, hingga langkah tegas deportasi terhadap buronan internasional dan pelanggar izin tinggal di berbagai wilayah. Ketegasan ini merupakan bentuk perlindungan bagi kedaulatan negara.

Kabar membanggakan juga datang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang kembali masuk dalam jajaran 10 besar layanan terbaik versi Skytrax. Tak lupa, kami sajikan ulasan ringan tetapi sarat makna dalam rubrik *Opini*, kemudahan paspor ABTC dalam *InformaTips*, serta refleksi kesehatan mental dalam *Pojokomunikasi*.

Edisi ini merupakan rangkuman dari kerja keras, inovasi, dan dedikasi seluruh insan Imigrasi. Kami berharap beragam informasi ini dapat memperkaya wawasan serta memperkuat keterbukaan informasi publik.

Selamat membaca, Sahabat Mido!



cerita sampul

Kepemimpinan Dirjen Hendarsam Marantoko membawa semangat baru bagi Imigrasi. Harmoni kearifan lokal dan inovasi menjadi napas baru dalam menghadirkan pelayanan Imigrasi yang dinamis, berintegritas, sekaligus tegas.

PENGARAH

Direktur Jenderal Imigrasi

PENANGGUNG JAWAB

Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi

PEMIMPIN UMUM

Koordinator Fungsi Komunikasi Publik

Ditjen Imigrasi

PEMIMPIN REDAKSI

Yolanda Rosylvia Juniar

ANGGOTA REDAKSI

Ajeng Dhyanti Paramitha, Ajeng Rahma Safitri, Arif Rahman Suryaman, Elyan Nadian Zahara, Eka Safitri, Fipit Fatimah, Habil Ashari I Made Donik Brahmadhi Putra Ardika, Irnadika Natasia Tiominar, Nabila Khansarani, Pandu Suryo Wicaksono, Rendy Firnanda Rr. Aditya Citraningtyas Ningrum, Rahmad Nur Iriyanto, Rizky Dikara Priatama, Immas Sari Wijaya, Maria Rosalin Tambunan, Yanos Okterano

PENYUNTING BAHASA

Tim Narabahasa

ILUSTRATOR SAMPL

Gepzki

PENATA LETAK & DESAIN

Tim Narabahasa

PERCETAKAN

Tim Narabahasa

SIRKULASI

Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi

ALAMAT REDAKSI

Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Lt. 8, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. X-6, No. 8, Kuningan, Jakarta Selatan

KONTAK REDAKSI

majalah.bhumpura@imigrasi.go.id

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Tulisan/ artikel yang dimuat akan mendapatkan honor sesuai standar yang berlaku.

DARI REDAKSI

3. Menata Arah, Memperkuat Imigrasi

LAPORAN UTAMA

8. Menavigasi Semangat Imigrasi untuk Rakyat

LIPUTAN KHUSUS

12. Strategi Imigrasi Hadapi Musim Haji 2026

14. Pimpin Narasi, Jaga Reputasi: Meneguhkan Peran Strategis Humas Imigrasi

KEBIJAKAN

16. Layanan Sport Visa: Kemudahan Administrasi bagi Atlet Internasional di Indonesia

KERJA KITA

18. Laboratorium Narkotika WN Rusia Dibongkar: Hasil Sinergi Imigrasi, BNN, dan Bea Cukai

20. Kompilasi Gakkum

22. Kompilasi Gakkum #2

24. Imigrasi Tangkap Buron Pembunuhan Sadis Asal Portugal di Jakarta Selatan

KILAS PERISTIWA

26. Bersaing di Tingkat Global: Imigrasi Soekarno-Hatta Raih Kembali 10 Besar World Airport Awards

27. No Trust, No Impact: Strategi Humas Pemerintah Memenangkan Kepercayaan Publik

28. Sosialisasi Pencegahan TPPO dan TPPM: Membentengi Mahasiswa dari Jerat Perbudakan Modern

36. Opini Geopolitik Dinamis, IMIGRASI STRATEGIS



Your Journey Starts with a Click

Apply online from anywhere, arrive in Indonesia seamlessly

evisa.imigrasi.go.id



Your Indonesian visa needs are now at your fingertips.
Access the official portal at:
evisa.imigrasi.go.id



**INDONESIAN
IMMIGRATION**
www.imigrasi.go.id



- 30.** Dialog dengan Media: Dirjen Imigrasi Tegaskan Semangat "Imigrasi untuk Rakyat"
31. Menilik Wajah Baru Imigrasi Makassar

INFORMATIPS

- 32.** Kiat Praktis Bepergian ke Negara Bebas Visa
33. Pebisnis Indonesia Kini Bisa Urus APEC Business Travel Card secara Daring

OPINI

- 34.** Paradoks Kebijakan Kewarganegaraan Indonesia: Antara Privilese Personal dan Konsekuensi Sosial
36. Geopolitik Dinamis, Imigrasi Strategis

POJOKOMUNIKASI

- 38.** Membesarkan Anak di Desa Global: Antara Peluang dan Jerat Digital
40. Sinyal Lelah di Balik Layar: Kelola Kesehatan Mental Saat Kerja dari Rumah

RENJANA

- 42.** Kembali ke Akar: Membangun Kedaulatan Hidup di Tengah Ketidakpastian Global

UMBIES EKSIS

- 44.** Para Kartini Imigrasi: Wujudkan Mimpi, Jaga Pintu Gerbang Negara

INFOGRAFIK

- 46.** Imigrasi Indonesia: Autogate
47. Langkah Mudah Menggunakan Autogate

KABAR DARI SEBERANG

- 48.** Utamakan Keselamatan Tamu Allah: KJRI Jeddah Siapkan Strategi Perlindungan WNI

RESENSI

- 50.** Refleksi Love Yourself bagi Insan Imigrasi: Bela Negara Dimulai dari Diri Sendiri

52. MATA LENSA

54. KOMIK



BhumiPura adalah media internal yang diterbitkan secara resmi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Majalah ini menyajikan berita dan tulisan seputar keimigrasian secara aktual, mendalam, dan informatif.

BhumiPura saat ini dapat dibaca atau diunduh melalui imigrasi.go.id/majalah.

Nggak Perlu Cuti Buat Paspor Sehari Jadi

Temukan titik terdekat **layanan percepatan paspor** pada akhir pekan di bawah ini.

Lokasi & Waktu Layanan

**Immigration Lounge
Kebayoran Park Mall
(Sabtu)**

Pukul 09.00–12.00

**Immigration Lounge
Mal Taman Anggrek
(Sabtu)**

Pukul 09.00–14.00

**Immigration Lounge
PIM 3 (Sabtu)**

Pukul 09.00–12.00

**Immigration Lounge
Grand Metropolitan
Bekasi (Sabtu)**

Pukul 10.00–14.00

**Immigration Lounge
Pesona Square Depok
(Sabtu)**

Pukul 10.00–15.00

**Immigration Lounge
PIK Avenue (Sabtu)**

Pukul 09.00–16.00

**Immigration Lounge
Solo Square**

Pukul 10.00–14.00

**UP3 Terminal 3
Soekarno–Hatta Airport**

Pukul 08.00–11.00

**Immigration Lounge
Delipark Medan (Sabtu)**

Pukul 09.00–14.00

Dokumen Persyaratan

Pemohon dewasa:

- KTP, kartu keluarga, akta kelahiran/ijazah/buku nikah
- Paspor lama (bagi yang telah memiliki paspor)

Pemohon anak di bawah umur:

- KTP orang tua, kartu keluarga, akta kelahiran/surat baptis
- Bukti menikah orang tua yang sah
- Paspor orang tua (pendamping)
- Paspor lama (bagi yang telah memiliki paspor)

Ajukan permohonan paspormu
melalui aplikasi **M-Paspor**



Dapatkan informasi lebih lanjut melalui Instagram:

@kanimjksel, @imigrasi_jakbar, @imigrasi_jakut,
@imigrasi.soekarnohatta, @imigrasibekasi, @imigrasi_depok,
@kanimsurakarta, @imigrasi_medan

MENAVIGASI SEMANGAT IMIGRASI UNTUK RAKYAT

"Saya tidak mempersoalkan siapa yang mendapat pengakuan atas suatu program. Yang penting adalah kebaikan bersama dan kemajuan institusi."
— Hendarsam Marantoko, Direktur Jenderal Imigrasi

■ Penulis: Elyan Nadian Zahara dan Ajeng Rahma Safitri

Tanggal 1 April 2026 menjadi penanda babak baru bagi Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi. Hendarsam Marantoko, pria kelahiran Tanjung Karang, 22 Desember 1977, resmi dilantik sebagai direktur jenderal (dirjen). Pelantikan ini membuka lembaran berikutnya dalam buku sejarah kehidupan Imigrasi dalam menghadapi tantangan dinamika dunia yang makin gamang.

Hendarsam telah berkiprah lebih dari dua dekade di dunia hukum. Ia menyelesaikan magister di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) dan berkarier sebagai *managing partner* di HMP Law Firm.

Sekitar dua minggu setelah pelantikannya, Tim Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi berkesempatan berbincang dengan Hendarsam. Sambil menyesap cokelat panas sore itu, Hendarsam bercerita mengenai cita-citanya sebagai dirjen Imigrasi.

Sebagai nakhoda baru Ditjen Imigrasi, apa rencana 100 hari yang ingin Bapak canangkan?

Langkah pertama yang saya lakukan memetakan dan memahami persoalan-persoalan yang ada secara menyeluruh. Dari situ, saya akan menyusun program yang terstruktur. Metodologi yang ingin saya terapkan adalah bahwa

setiap penyelesaian masalah tidak boleh melahirkan masalah baru. Saya ingin perubahan yang bersifat struktural, bukan tambal sulam.

Saya memang baru menjabat 17 hari, dan observasi saya belum selesai. Ada banyak variabel yang perlu ditelaah lebih dalam lagi, misalnya apakah ada faktor kesejahteraan, budaya dan kultur organisasi, serta dari mana kultur itu bermula.

Salah satu hal yang menarik perhatian saya adalah sistem pendidikan di Politeknik Imigrasi (Poltekim) yang saat ini tidak menerapkan sistem asrama. Saya mendapat informasi bahwa banyak pelanggaran justru dilakukan oleh pegawai-pegawai yang baru lulus. Ketika mereka tidak tinggal dalam lingkungan yang terstruktur dan terisolasi dari pengaruh luar, mereka menjadi lebih rentan terhadap tekanan gaya hidup di luar institusi. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor pembentuk perilaku yang tidak kita inginkan.

Apakah sistem asrama perlu menjadi opsi? Itu masih perlu dikaji. Namun, inilah yang saya maksud dengan metodologi berbasis akar masalah. Kita identifikasi terlebih dahulu sumber

SELAYANG PANDANG HENDARSAM MARANTOKO

Sebelum terjun ke pemerintahan, Hendarsam Marantoko membangun reputasi yang kuat di bidang hukum sebagai pengacara litigasi dan nonlitigasi.

- Advokat di Minola Sebayang & Partners (2004–2007)
- Pendiri dan *managing partner* sejak 2008 di HMP Law Firm (Hendarsam Marantoko & Partners)
- *Managing partner* di Rajaolan Marantoko & Partners (2008–2009)
- *Senior partner* di Wetmen Sinaga & Partners (2009–2014)



persoalannya, kemudian cari solusinya, lalu lakukan perubahan secara sistemik dan struktural.

Bapak kerap menekankan semangat Imigrasi untuk rakyat. Apa harapan Bapak di balik semangat ini?

Bagaimana Bapak mendorong jajaran Imigrasi untuk mengimplementasikannya?

Pada dasarnya, semua lembaga negara yang

“KEEMPAT FUNGSI IMIGRASI BERMUARA PADA RAKYAT.”

dibentuk memang harus berorientasi pada rakyat. Namun, Imigrasi memiliki keunikan tersendiri. Dari keempat fungsi yang kita emban, fungsi pelayanan terbagi menjadi dua, yaitu pelayanan kepada warga negara Indonesia (WNI) dan pelayanan kepada warga negara asing (WNA). Di sisi lain, kita juga menjalankan fungsi penegakan hukum terhadap WNA. Hal ini menciptakan situasi ketika kita kadang harus memilih: berpihak kepada rakyat sendiri atau mengakomodasi kepentingan pihak asing? Jawaban saya tegas: Selama hukum menjadi landasannya, keberpihakan

Imigrasi adalah kepada rakyat. Implementasinya dapat beragam, mulai dari kebijakan paspor dan visa, hingga penegakan hukum terhadap WNA yang merugikan masyarakat kita.

Kita telah menyaksikan banyak kasus ketika WNA mengambil alih mata pencaharian rakyat. Kedaulatan rakyat itu harus kita kembalikan melalui tangan kita sendiri. Saya yakin,

Digital Imaging:
Dedy Damping





Digital Imaging: Dedy Damping

jajaran Imigrasi memiliki kemampuan untuk merumuskan langkah-langkah teknisnya. Banyak program yang mungkin sudah berjalan, tetapi membutuhkan dorongan kepemimpinan yang kuat agar dapat berjalan optimal.

Kini tugas saya adalah menyelaraskan seluruh program yang telah dicanangkan oleh Menteri Agus Andrianto, yaitu 15 program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemnimipras), yang tujuh di antaranya adalah program keimigrasian. Semua program aksi tersebut merupakan penjabaran dari Asta Cita Presiden.

Jika saya harus meringkas dalam satu kalimat: *Mindset* Imigrasi harus berpusat pada rakyat. Keempat fungsi Imigrasi bermuara pada rakyat. Apa pun kebijakan yang dirumuskan, orientasinya adalah rakyat. Sebagaimana Presiden Prabowo selalu menempatkan rakyat sebagai inti dari setiap keputusannya, itulah arah yang ingin saya bawa ke dalam institusi ini.

Bapak menyebutkan bahwa Imigrasi bukan hanya pelayanan, melainkan juga pengawasan dan pe-



BERIKUT SEJUMLAH POSISI LAIN YANG PERNAH DIEMBANNYA.

- Wakil ketua di Advokat Cinta Tanah Air (ACTA)
- Ketua DPP (Dewan Pimpinan Pusat) bidang kajian hukum di Partai Gerindra
- Pendiri dan wakil ketua Asosiasi Advokat Muda Seluruh Indonesia (AAMSI)
- Advokat dan anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)
- Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga di Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI)
- Auditor hukum di Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI)
- Tenaga ahli di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

negakan hukum. Apa strategi Bapak untuk memperkuat fungsi intelijen dan pengawasan keimigrasian?

Dulu, poros politik Indonesia relatif jelas dan stabil sehingga Imigrasi pun tahu persis langkah apa yang harus diambil. Kini, situasinya jauh lebih dinamis. Presiden kita masuk ke dalam BRICS, menjalin komunikasi dengan Donald Trump, dan dalam waktu yang berdekatan juga berkomunikasi dengan Vladimir Putin. Jika Imigrasi tidak mampu membaca dinamika dan visi beliau, kita akan mudah stagnan dalam menjalankan roda kelembagaan ini. Saya percaya, presiden kita adalah *the right man at the right time*. Beliau adalah sosok yang paling siap dan paling berkapasitas untuk menghadapi tantangan Indonesia saat ini. Dan mungkin itulah mengapa Imigrasi pun memerlukan figur yang mampu memahami cara pandang dan arah pikiran beliau. Namun, satu hal yang tidak akan pernah berubah: Orientasi kita adalah rakyat.

Dalam konteks itulah, saya mengembangkan pendekatan yang saya sebut *selective policy*. Analoginya sederhana: Ada pintu yang terbuka dan ada pintu yang tertutup. Pintu terbuka kami peruntukkan bagi WNA yang membawa manfaat nyata bagi Indonesia; mereka kita sambut dengan pelayanan yang mudah dan ramah. Sebaliknya, pintu kita tutup rapat bagi mereka yang tidak memberikan nilai tambah, mengganggu ketertiban dan keamanan, atau bahkan mengambil alih mata pencaharian warga kita.

“SAYA INGIN PERUBAHAN YANG BERSIFAT STRUKTURAL, BUKAN TAMBAL SULAM.”

Yang kita kejar bukanlah kuantitas, melainkan kualitas. Sebab, jika Indonesia tidak aman dan tidak kondusif—karena dipenuhi oleh WNA yang tidak berkontribusi—mereka yang benar-benar ingin berinvestasi dan berkontribusi pun

tidak akan mau masuk.

Imigrasi memang harus hadir dengan dua wajah: wajah yang ramah dan terbuka bagi mereka yang berpotensi memberikan kontribusi, sekaligus wajah yang tegas, bahkan keras, bagi mereka yang merugikan rakyat kita.

Apa pendapat Bapak mengenai kebijakan visa seperti *Global Citizen of Indonesia* dan *golden visa*? Apa kebijakan tersebut sudah sejalan dengan *selective policy*?

Golden visa dan jenis visa lainnya termasuk dalam ranah fungsi pelayanan Imigrasi. Dalam fungsi pelayanan, inovasi memang diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) maupun menarik WNA yang berkualitas. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah evaluasi.

Saya sudah memiliki beberapa catatan meskipun masih perlu didiskusikan lebih lanjut bersama jajaran direktur untuk menentukan mana yang perlu dilanjutkan, disempurnakan, atau ditata ulang.

Saya ambil satu contoh konkret. Banyak yang bertanya mengenai keterlibatan Imigrasi dalam mendukung dunia olahraga, misalnya terkait Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi). Sebenarnya, itu adalah implementasi dari *sport visa* yang sudah kita miliki. Kita telah meluncurkan program tersebut, tetapi pertanyaannya: Apakah sudah ada prosedur operasional standar (POS) yang jelas? Apakah sudah ada *road-map* yang terstruktur untuk ke depannya? Itulah yang masih

pembangunan bangsa di segala bidang.

Bagaimana strategi Bapak dalam memimpin dan mengarahkan 16.000 pegawai Imigrasi tersebut?

Saya ingin memulai dari sesuatu yang mendasar, yaitu mengenali diri sendiri. Apa kelebihan kita? Apa kekurangan kita? Kekurangan itulah yang harus ditutupi dengan kekuatan tim.

Kalau boleh saya katakan, Imigrasi ini *too good to be true*. Sumber daya manusianya (SDM) sangat mumpuni dan adaptif. Ketika pimpinan sudah menentukan arah, mereka mengikuti. Ini adalah modal yang luar biasa dan saya sangat terbantu dengan itu.

Salah satu hal yang paling saya pikirkan adalah kesejahteraan pegawai. Saya belajar dari Presiden yang selalu memikirkan kesejahteraan rakyat secara luas. Maka saya memikirkan kesejahteraan pegawai Imigrasi, termasuk yang bertugas di daerah terluar dan tertinggal.

Saya akan turun langsung ke lapangan, memetakan masalah, dan mencari solusi konkret. Imigrasi memiliki sekretariat yang kuat, dan dibandingkan dengan banyak kementerian lain, kondisi keuangan kita cukup baik. Namun, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak meningkatkan kesejahteraan pegawai secara lebih nyata.

Apa filosofi hidup yang Bapak pegang dalam membuat keputusan yang sulit?

Bagi saya, tidak ada suatu keputusan yang benar-benar sulit. Semua kembali pada cara kita memandang persoalan.

Satu-satunya hal yang selalu saya pertimbangkan adalah apakah keputusan ini melanggar hukum atau tidak. Selama sebuah keputusan tidak melanggar hukum dan orientasinya untuk kebaikan bersama, keputusan itu layak dijalankan.

Saya juga memegang filosofi yang selalu saya tanamkan kepada seluruh insan Imigrasi: Kita harus terus meningkatkan diri. Setiap hari harus ada sesuatu—pengetahuan baru yang bermanfaat—yang kita pelajari. ■

STRATEGI IMIGRASI HADAPI MUSIM HAJI 2026

Pada 2026, 15.804 jemaah asal Makassar akan menikmati layanan Makkah Route di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Dengan dukungan 115 petugas dari Imigrasi Arab Saudi, Indonesia bersiap melayani jemaah haji secara lebih aman dan efisien.

■ Penulis: Elyan Nadian Zahara

Di tengah gersangnya Gurun Jhum yang membentang antara Jeddah dan Makkah, sebuah pemantauan *drone* oleh aparat keamanan Arab Saudi menyingkap

sebuah tragedi yang terjadi pada 2025 lalu. Di sana, seorang warga negara Indonesia (WNI) berinisial SM ditemukan dalam kondisi tak bernyawa, sementara dua rekannya terkulai lemas akibat de-

hidrasi berat. Ketiganya merupakan penyintas perjalanan nekat demi mencapai tanah suci Makkah melalui jalur belakang.

Nasib nahas ini bermula saat mereka menggunakan jasa taksi gelap untuk menembus perbatasan. Lantaran dihantui ketakutan akan patroli petugas, sang sopir tega menurunkan mereka begitu saja di tengah lautan pasir yang membakar. Penelusuran menunjukkan bahwa SM berangkat dari Surabaya via

Sumber: freepik.com



Hong Kong dan tiba di Arab Saudi pada 24 April 2025 menggunakan visa ziarah—sebuah celah yang kala itu diambil sebelum adanya pengetatan aturan masa tinggal bagi pemegang visa nonhaji.

Sinergi Memberantas Haji Ilegal

Menanggapi insiden tersebut serta maraknya praktik nonprosedural, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menyatakan komitmen penuh untuk mengawal penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Langkah ini diwujudkan melalui penguatan Satuan Tugas (Satgas) Haji yang diinisiasi oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), bersinergi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasaran (Kemenimip) serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Fokus utama kolaborasi ini adalah memberantas sindikat haji ilegal secara menyeluruh guna menjamin keselamatan dan kepastian hukum bagi setiap jemaah asal Indonesia.

Seluruh jajaran petugas imigrasi di bandar udara (bandara) embarkasi dan debarkasi telah disiagakan untuk memberikan pelayanan optimal bagi para jemaah haji Indonesia. Mereka juga akan memperkuat pengawasan sebagai langkah preventif terhadap potensi keberangkatan calon jemaah haji secara nonprosedural.

Kesiapan layanan imigrasi mencakup 14 bandara embarkasi utama, mulai dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (Bandara Aceh) hingga Bandara Internasional Yogyakarta (YIA). Untuk memastikan kelancaran arus keberangkatan dan kepulangan sekitar 221.000 jemaah, pihak Imigrasi telah mengerahkan personel dan infrastruktur pendukung, termasuk fasilitas gerbang otomatis (*auto-gate*) di bandara dengan volume tinggi, seperti Bandara Internasional Kuala Lumpur (KNO), Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK), Bandara Internasional Juanda (SUB), dan lainnya. Fasilitas tersebut digunakan untuk mempercepat proses pemeriksaan keimigrasian.

“Kami telah menginstruksikan seluruh jajaran di setiap bandara embarkasi untuk memberikan layanan terbaik bagi jemaah haji kita. Pada saat yang sama, kami juga berkomitmen penuh memperkuat pengawasan terhadap calon jemaah haji nonprosedural. Langkah ini adalah upaya kami melindungi masyarakat dari praktik penyalahgunaan dokumen dan modus keberangkatan ilegal yang merugikan jemaah itu sendiri,” tegas Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Hendarsam Marantoko.

Lebih lanjut, Hendarsam menambahkan, “Jemaah calon haji yang dinyatakan ditunda keberangkatannya dan terindikasi nonprosedural, namanya akan diinput ke dalam aplikasi *Subject of Interest* (Sol) oleh petugas kami selama berlangsungnya musim haji supaya dia tidak bisa mencoba berangkat dari bandara yang lain.”

Sinergi antarinstansi menjadi kunci penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Berdasarkan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan, proses keberangkatan jemaah gelombang pertama dari tanah air ke Madinah dimulai pada Rabu (22/4) dan akan berlangsung hingga Rabu (6/5). Setelah itu, jemaah gelombang kedua akan diberangkatkan menuju Jeddah mulai tanggal 7 Mei hingga 21 Mei 2026. Dirjen Imigrasi memastikan bahwa seluruh prosedur pemeriksaan dokumen berjalan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Embarkasi Keempat Berskema Makkah Route

Sekitar 15.804 calon jemaah haji asal embarkasi Makassar pada 2026 akan turut menikmati skema Makkah Route yang tahun ini mulai hadir di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar. Skema tersebut melengkapi layanan yang sebelumnya juga telah beroperasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Internasional Juanda, dan Bandara Internasional Adi Soemarmo.

Makkah Route adalah kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi berupa proses pemeriksaan keimigrasian lebih awal (*pre-clearance*) yang dilakukan langsung oleh petugas dari Imigrasi Arab Saudi di bandara keberangkatan Indonesia. Manfaat ut-

amanya adalah memangkas waktu dan prosedur karena jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan paspor dan visa saat tiba di Arab Saudi. Dengan demikian, mereka dapat langsung fokus menjalankan ibadah. Secara fungsi, program ini menjadi instrumen strategis untuk mempercepat mobilitas serta meningkatkan kenyamanan jemaah, khususnya bagi kelompok lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas.

Jumlah calon jemaah haji dari Indonesia pada 2026 mencapai hampir seperempat juta orang. Dengan jumlah tersebut, Dirjen Imigrasi menyatakan bahwa penambahan titik layanan di Makassar merupakan upaya kedua negara dalam meningkatkan kualitas pelayanan haji.

“Perluasan Makkah Route ke Makassar adalah upaya strategis untuk memastikan makin banyak jemaah Indonesia yang merasakan kemudahan proses keimigrasian sejak dari tanah air. Kami ingin memangkas birokrasi sehingga jemaah bisa lebih tenang dalam mempersiapkan diri menuju tanah suci,” ujar Hendarsam.

Sebagai bentuk kesiapan operasional, sebanyak 115 petugas Imigrasi Arab Saudi telah tiba di Indonesia pada Senin (20/4) untuk ditugaskan di bandara tersebut. Kesiapan sarana dan prasarana di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) terkini telah mencapai 100%. Selain itu, pemerintah juga telah mengintegrasikan data lintas sektoral dan menyusun profil risiko untuk mencegah keberangkatan calon jemaah haji nonprosedural guna memastikan seluruh jemaah terlayani dengan aman.

Ke depannya, Ditjen Imigrasi berharap layanan Makkah Route dapat terus diperluas hingga menjangkau seluruh embarkasi haji di Indonesia. Pemerintah juga terus mendorong agar layanan ini dapat diterapkan secara resiprokal sehingga pelayanan terhadap jemaah haji menjadi jauh lebih optimal bagi kedua belah pihak. “Imigrasi akan terus bertransformasi demi memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat. Kami berkomitmen untuk menghadirkan layanan yang adaptif dan solutif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk dalam menyelesaikan ibadah haji. Layanan imigrasi untuk rakyat adalah prioritas kami,” pungkas Hendarsam. ■

“KAMI INGIN MEMANGKAS BIROKRASI SEHINGGA JEMAAH BISA LEBIH TENANG DALAM MEMPERSIAPKAN DIRI MENUJU TANAH SUCI.”





Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko (Foto: Tommy Ariyanto)

Pimpin Narasi, Jaga Reputasi: **MENEGUHKAN PERAN STRATEGIS HUMAS IMIGRASI**

Sejumlah 166 pimpinan UPT Imigrasi se-Indonesia berkumpul di Jakarta untuk menghadiri forum Kopdar Humas Imigrasi. Tema “Pimpin Narasi, Jaga Reputasi” menjadi seruan agar pimpinan tak lagi menjadi penonton pasif pada era ledakan informasi.

■ Penulis: Yolanda Rosylvia Juniar

Lampu panggung meredup sejenak sebelum lampu sorot menyambar ke tengah ruangan. Dua belas penari berkostum hitam memelasat lincah, bergerak dinamis mengikuti entakan lagu dalam sebuah pertunjukan teatrikal ala Broadway. Sebanyak 166 pasang mata dari para pimpinan unit pelaksana teknis (UPT) Imigrasi di seluruh Indonesia hanyut dalam suasananya. Pagi itu di Jakarta, energi semangat disuntikkan sebagai awal dimulainya forum Kopdar Humas Imigrasi 2026.

“Pimpin Narasi, Jaga Reputasi”, tema besar yang diusung tahun ini, menjadi pengingat bagi para pimpinan Imigrasi di seluruh Indonesia bahwa pada era ketika isu di media sosial dapat

meledak dalam hitungan detik, narasi tidak boleh dibiarkan terbentuk secara liar. Pimpinan Imigrasi kini tidak boleh lagi menjadi penonton yang pasif dan harus siap menjadi nakhoda yang mengarahkan arus informasi.

Untuk itu, dalam Kopdar Humas Imigrasi kali ini, seluruh peserta disuguhkan dua sesi pembekalan. Pada sesi pertama, pakar komunikasi sekaligus pembawa acara kaliber nasional Lala Tangkudung memaparkan materi bertajuk “Komunikasi Digital sebagai Wajah Reputasi”. Lala menekankan bahwa pada era virtual, pimpinan harus mampu menguasai *total presence* atau perhatian penuh dalam komunikasi. Ia menjelaskan bahwa setiap tindakan,

ekspresi wajah, hingga cara berbicara di depan kamera merupakan bagian integral dari pembentukan citra diri dan institusi.

Pembekalan dilanjutkan dengan sesi kedua yang membahas strategi komunikasi yang dipandu oleh Direktur Utama Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA Benny Butarbutar melalui topik “Pemimpin Tanggap, Komunikasi Mantap”. Fokus utama dalam sesi ini adalah membangun ketangkasan pimpinan dalam menghadapi isu sensitif. Benny menekankan pentingnya pimpinan untuk memiliki sensitivitas terhadap gejala-gejala krisis. Dengan melakukan pemantauan media yang objektif dan responsif, pimpinan diharapkan mampu

meredam percikan masalah sebelum berkembang menjadi krisis besar yang merusak reputasi.

Efektivitas seorang pemimpin saat ini tidak lagi semata-mata ditentukan oleh jabatan struktural yang disandanginya, tetapi juga melalui kemampuan komunikasinya dalam membangun reputasi yang tanggap. Komunikasi kepemimpinan dipahami sebagai proses dinamis untuk membentuk makna, membangun kepercayaan, dan menggerakkan tindakan kolektif. Dalam praktiknya, pemimpin menjalankan empat fungsi strategis utama, yaitu membentuk realitas organisasi, memengaruhi kepercayaan, menggerakkan tindakan, serta mengelola krisis. Terkait hal ini, Benny menegaskan, "Jabatan memberikan mikrofon, tetapi komunikasi kepemimpinan menentukan apakah orang masih mau mendengarkan."

Dalam lingkup pengelolaan kebijakan publik, lanjut Benny, seorang pemimpin harus mampu menyinkronkan tiga elemen krusial, yaitu kebijakan, narasi, dan kepercayaan. Benny mengingatkan pentingnya integrasi ketiga elemen tersebut. "Kebijakan tanpa narasi adalah birokrasi; narasi tanpa konsistensi adalah propaganda; dan kebijakan yang disertai narasi serta konsistensi akan melahirkan kepercayaan," kata Benny.

Pada sesi ini, Benny menunjuk Kepala Kantor Imigrasi Kotabumi Aaron Nicky Santosa, Kepala Kantor Imigrasi Pamekasan Ahmad Muttaqin; serta Kepala Kantor Imigrasi Depok Irvan Triansyah sebagai tiga peserta terbaik. Dengan dua sesi pembekalan dari pakar komunikasi tersebut, para pimpinan diharapkan tidak hanya mampu menyampaikan informasi, tetapi juga mengarahkan narasi institusi secara konsisten, proaktif, dan berbasis data demi tercapainya kesepahaman dengan masyarakat.

Sinergi dan Komitmen untuk Masa Depan

Forum ini juga menjadi ajang dialog terbuka antara pimpinan pusat dan daerah. Sekretaris Direktorat Jenderal (Ses-

ditjen) Imigrasi Sandi Andaryadi dalam sambutannya mendorong para kepala UPT untuk menjadi sosok pemimpin yang "mendengar". Komunikasi dua arah yang jujur antara pimpinan dan tim humas di unit kerja diyakini menjadi fondasi organisasi yang sehat dan tangguh.

Lebih lanjut, Sandi menekankan, "Keberhasilan tim humas di unit Bapak dan Ibu bukan semata-mata soal kemampuan staf. Ia sangat ditentukan oleh sejauh mana pimpinan hadir, mendukung, dan memberi ruang." Sandi mengingatkan bahwa pimpinan harus mampu memilah mana informasi yang layak dikonsumsi publik dan mana yang bersifat internal demi menjaga kepercayaan masyarakat yang telah dibangun dengan susah payah.

Puncak kegiatan ditutup dengan pidato utama dari Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Hendarsam Marantoko. Dalam arahannya, Hendarsam menekankan bahwa stabilitas instansi pada era ledakan informasi saat ini ditopang oleh tiga pilar utama, yaitu peran insan Imigrasi sebagai penjaga gerbang (*gatekeeper*) informasi, kemampuan membentuk opini publik yang positif, serta ketepatan dalam merespons isu.

"Stabilitas instansi kita saat ini tidak lagi hanya ditentukan oleh kinerja fisik, melainkan juga bagaimana kita mengelola informasi. Pilar utamanya adalah

peran kita sebagai *gatekeeper*, kemampuan membentuk opini, serta kecepatan dan ketepatan dalam merespons isu," tegas Hendarsam.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa di tengah tantangan yang ada, Imigrasi harus tetap hadir sebagai institusi yang melayani masyarakat. Kepercayaan masyarakat yang terbangun melalui profesionalisme dan transparansi akan menjadi perisai paling kuat dalam menghadapi disinformasi di ruang publik.

Di penghujung acara, seluruh kepala unit kerja diminta mempersiapkan upaya terbaiknya dalam gelaran tahunan Anugerah Humas Imigrasi Indonesia (AHII) tahun 2026. Terdapat sembilan kategori yang disiapkan untuk ajang tersebut yang akan dihelat pada akhir tahun ini. Penghargaan ini diharapkan menjadi pemicu bagi setiap UPT untuk terus berinovasi dalam mengomunikasikan kebijakan dan layanan imigrasi kepada masyarakat luas.

Kopdar Humas Imigrasi 2026 ditutup dengan harapan besar agar seluruh peserta membawa pulang komitmen baru. Dengan sinergi yang lebih kuat antara pimpinan dan jajaran humas, Imigrasi optimistis dapat menjaga muruah instansi, memperkuat reputasi, dan terus menjadi institusi yang dipercaya oleh masyarakat sebagai penjaga pintu gerbang negara yang berwibawa. ■



Suasana diskusi interaktif pusat dan daerah bersama Dirjen Imigrasi dan Sesditjen Imigrasi di penghujung acara Kopdar Humas Imigrasi (Foto: Arif Rahman Suryaman)

Layanan *Sport Visa*:

KEMUDAHAN ADMINISTRASI BAGI ATLET INTERNASIONAL DI INDONESIA

Untuk mendukung ekosistem olahraga nasional, Direktorat Jenderal Imigrasi mempermudah proses administrasi dan menyediakan jalur khusus bagi atlet mancanegara melalui visa olahraga (*sport visa*). Inisiatif ini didukung dengan tim khusus lintas direktorat yang menangani dari sektor pelayanan hingga pengawasan.

■ Penulis: Elyan Nadian Zahara

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi memberikan kemudahan layanan dan jalur khusus bagi atlet asing untuk mendukung ekosistem olahraga

nasional. Langkah ini diperkuat melalui sinergi dengan Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) dalam mengawasi sekaligus mengedukasi

pemain asing yang berkompetisi di Indonesian Basketball League (IBL).

Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Hendarsam Marantoko menyatakan bahwa dukungan ini merupakan bagian dari peran Imigrasi sebagai fasilitator pertumbuhan sektor potensial, termasuk olahraga. "Kami akan membentuk tim khusus yang menangani sektor olahraga. Dengan begitu, para atlet akan lebih mudah dalam proses administrasi," ujar Hendarsam saat meninjau pertandingan IBL All-Star 2026

Aksi balap mobil kursi tunggal (*single-seater*) di ajang Formula E (Foto: Simon Galloway / Getty Images)



di Bandung Arena, Jawa Barat, Sabtu (11/4) malam.

“Tim khusus akan terdiri atas perwakilan lintas direktorat teknis, baik dari sektor layanan maupun pengawasan. Jadi meskipun tujuannya untuk memudahkan, fungsi pengawasan tetap berjalan,” imbuh Hendarsam. Ia juga menjelaskan bahwa langkah ini untuk memastikan layanan visa olahraga (*sport visa*) berjalan adaptif dan efisien sesuai kebutuhan industri *sportainment* yang terus berkembang.

Sport visa merupakan produk visa kunjungan yang khusus diperuntukkan bagi atlet (indeks C8A) serta ofisial atau pendamping (indeks C8B) untuk kegiatan olahraga nonkomersial atas undangan pemerintah atau organisasi keolahragaan internasional. Selain

itu, tersedia indeks D8 bagi mereka yang membutuhkan visa beberapa kali perjalanan (*multiple entry*). Untuk mendapatkannya, pemohon cukup melampirkan paspor, foto terbaru, surat undangan dan jaminan dari penjamin, serta rekening koran melalui laman evisa.imigrasi.go.id. Dengan visa ini, pemegangnya bisa tinggal di Indonesia selama 60 hari.

“Pemain asing dan tim ofisialnya cukup melampirkan rekomendasi dari organisasi olahraga. Persyaratannya lebih sederhana, sebagaimana diatur dalam PP 40 Tahun 2023 dan Permenkumham 22 Tahun 2023. Jadi, visa bisa langsung diberikan tanpa syarat keterangan pengalaman kerja atau Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) dari kepolisian negara asal,” ungkap Hendarsam.

“EKOSISTEM OLAHRAGA YANG BERKEMBANG AKAN MEMBAWA CITRA POSITIF INDONESIA KE DUNIA.”

Skema visa tersebut telah disederhanakan dari versi sebelumnya dengan peruntukan yang sama. Atlet maupun tim ofisial tidak perlu lagi melampirkan rekomendasi dari instansi terkait untuk mengikuti kegiatan olahraga atas undangan pemerintah Indonesia, kejuaraan olahraga tingkat internasional, atau kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh organisasi keolahragaan internasional. *Sport visa* bagi tim ofisial dan atlet bisa diajukan secara daring sejak 28 September 2023.

Kehadiran *sport visa* mendapat respons positif yang terlihat pada jumlah pengajuan yang signifikan. Pada 2025, Imigrasi telah menerbitkan sebanyak 6.388 *sport visa*. Sementara itu, sejak 1 Januari hingga 31 Maret 2026, jumlah pengajuan terus menunjukkan peningkatan yang mencapai 866 visa.

Guna menjamin kenyamanan, Imigrasi menyediakan beberapa fasilitas, di antaranya jalur khusus (*fast track*) dan konter pemeriksaan dokumen di bandara agar atlet tidak perlu mengantre lama. Fasilitas lain adalah penggunaan teknologi gerbang otomatis (*autogate*) yang dapat mempercepat proses kedatangan maupun keberangkatan secara otomatis. Dalam hal penerbitan visa, Imigrasi memberikan fasilitas penerbitan secara kolektif dan percepatan penerbitan untuk kegiatan olahraga berdasarkan permohonan dari penyelenggara kegiatan. Kemudahan ini diharapkan mampu menjaga performa atlet saat bertanding karena terhindar dari kelelahan akibat proses administrasi yang kompleks.

Sebagai bentuk dukungan, Ditjen Imigrasi telah memfasilitasi sejumlah kegiatan olahraga internasional sepanjang tahun 2023 s.d. 2026, di antaranya Formula E Jakarta, MotoGP Mandalika, U-17 World Cup, dan FIFA Series Indonesia Olimpiade Paralimpik.

Hendarsam menegaskan bahwa kemudahan ini akan terus ditingkatkan seiring rencana Indonesia menjadi tuan rumah berbagai agenda internasional, seperti FIBA U-17 Asia Cup dan FIBA U-19 World Cup. “Ekosistem olahraga yang berkembang akan membawa citra positif Indonesia ke dunia. Kami berupaya menghadirkan pelayanan yang adaptif tanpa mengabaikan pengawasan demi memperkuat industri olahraga nasional dan mendongkrak ekonomi melalui ajang internasional,” tutup Hendarsam. ■



Laboratorium Narkotika WN Rusia Dibongkar: **HASIL SINERGI IMIGRASI, BNN, DAN BEA CUKAI**

Dua warga negara Rusia diamankan dalam operasi gabungan membongkar laboratorium narkotika ilegal di Gianyar, Bali. Pengungkapan ini berawal dari permohonan pelacakan terhadap salah satu tersangka yang diduga bagian dari jaringan peredaran narkotika internasional.

■ Penulis: Harjisisito Dani

Tim gabungan dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membongkar operasional laboratorium gelap narkotika (*clandestine laboratory*) di Kabupaten Gianyar, Bali. Dalam operasi yang berlangsung pada Kamis (5/3) malam hingga Jumat (6/3) dini hari tersebut, petugas mengamankan dua warga negara asing (WNA), ST (30) dan NT (29) asal Rusia yang diduga mengendalikan tempat produksi barang haram itu.

Pengungkapan ini bermula dari koordinasi intensif setelah BNN mengajukan permohonan pelacakan terhadap NT kepada Direktorat Intelijen Keimigrasian pada awal Februari lalu. NT diduga merupakan bagian jaringan peredaran narkotika internasional yang beroperasi di Bali.

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bugie Kurniawan menjelaskan bahwa investigasi lapangan sempat terkendala oleh upaya kamufase pelaku. "Hasil

pengecekan pada 5 Februari menunjukkan alamat tinggal yang didaftarkan NT di kawasan Ungasan, Badung, ternyata fiktif. Hal ini memicu tim untuk melakukan pelacakan lebih dalam melalui data keimigrasian dan pengawasan lapangan," ujar Bugie di Gianyar, Jumat.

Penyergapan dilakukan secara simultan di dua lokasi di wilayah Sukawati, Gianyar, pada Kamis pukul 23.30 WITA. Di lokasi pertama, Villa Rena's Kubu, petugas menangkap ST dengan barang bukti berupa cairan kimia dalam galon yang diduga bahan baku narkotika.

Sementara itu, di lokasi kedua, The Tetamian Bali, petugas mengamankan NT. Di sana, ditemukan cairan kimia yang disembunyikan dalam mobil sewaan. Petugas juga menyita sebuah paspor palsu atas nama Kseniia Kozina yang digunakan NT untuk menyewa properti dan kendaraan guna mengelabui otoritas. Selain itu, Kepala BNN Suyudi Ario Seto dalam keterangannya pada Sabtu (7/3) menyebutkan bahwa kunci kendaraan dan kunci vila lain juga

ditemukan pada lokasi tersebut.

Pengembangan penyelidikan dari kedua tersangka mengarahkan petugas ke lokasi ketiga, yakni Villa De Bale Marcapada di kawasan Saba, Blahbatuh. Di tempat inilah petugas menemukan laboratorium yang dirancang khusus untuk memproduksi narkotika. Laboratorium tersebut memiliki dua ruangan produksi yang dilengkapi dengan puluhan jeriken bahan kimia cair.

Pengungkapan laboratorium narkotika tersebut menjadi upaya krusial untuk memutus rantai produksi narkotika di dalam negeri. Keberadaan *clandestine laboratory* menandakan jaringan narkotika tidak hanya menyelundupkan produk jadi, tetapi juga memproduksi secara lokal. "Dengan pengungkapan ini, potensi peredaran narkotika yang dapat merusak masyarakat bisa dicegah sejak tahap produksi," ujar Direktur Interdiksi Narkotika Bea Cukai R. Syarif Hidayat.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna menyatakan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari sinergi antarinstansi dalam memitigasi kejahatan transnasional. Menurutnya, Bali sebagai destinasi internasional sangat rentan disalahgunakan oleh jaringan kriminal global.

"Kami memberikan apresiasi kepada jajaran yang bekerja responsif dan penuh integritas. Sinergi dengan BNN dan Bea Cukai adalah kunci menjaga kewibawaan wilayah kita dari aktivitas ilegal warga asing," tutur Felucia.

Selain jeratan pidana narkotika yang ditangani BNN, pihak Imigrasi memastikan akan memproses pelanggaran keimigrasian berat yang dilakukan kedua WNA, termasuk penggunaan dokumen perjalanan palsu dan penyalahgunaan izin tinggal. Langkah ini diambil untuk menjaga citra Bali sebagai destinasi wisata yang aman dan tertib bagi wisatawan mancanegara. ■



Konferensi pers pengungkapan laboratorium gelap narkotika di Bali (Foto: Dok. Kanim Ngurah Rai)

All Indonesia

Simplify Your Arrival

Integrated Passenger Declaration System

Fill it in
**up to 3 days
before arriving**
in Indonesia



Now **available at**



Imigrasi Bogor Amankan 13 WN Jepang Diduga Pelaku Kejahatan Siber

Sejumlah 13 warga negara Jepang diringkus Imigrasi Bogor karena diduga menjadi pelaku penipuan daring. Mereka mengintimidasi korban lewat panggilan video hingga menguras dana investasi.

Kantor Imigrasi Bogor mengamankan 13 warga negara (WN) Jepang yang diduga terlibat dalam praktik penipuan daring (*online scamming*). Belasan warga negara asing (WNA) tersebut diringkus dalam operasi pengawasan keimigrasian di kawasan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, pada Senin (2/3) malam.

Operasi ini bermula dari pengamatan intensif yang dilakukan oleh tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Intel-dakim) selama beberapa hari terakhir. Petugas mencium adanya aktivitas mencurigakan di sebuah kawasan hunian di Sentul yang melibatkan sejumlah WNA.

Dalam penggerebekan yang dilakukan di tiga rumah berbeda, petugas menemukan 13 pria berkebangsaan Jepang. Dari hasil pemeriksaan dokumen di tempat, didapati bahwa tiga orang di antaranya tidak dapat menunjukkan paspor asli saat diminta oleh

petugas. Para WNA ini diduga menjalankan praktik penipuan daring yang menasar korban di negara asal mereka.

Kepala Kantor Imigrasi Bogor Ritus Ramadhana menjelaskan modus operandi yang digunakan sindikat tersebut. Pelaku mengaku sebagai petugas dari penyedia layanan telekomunikasi Jepang, kemudian mengintimidasi korban melalui panggilan telepon dan video melalui aplikasi LINE.

Korban selanjutnya diarahkan untuk mengakses situs web palsu yang menampilkan surat perintah penangkapan yang seolah-olah dikeluarkan oleh otoritas Jepang. Setelah itu, korban diminta menunjukkan data keuangan, mencairkan investasi, dan mentransfer dana dalam jumlah besar.

Selain mengamankan para terduga, petugas juga menyita sejumlah barang bukti yang memperkuat dugaan adanya aktivitas kejahatan siber. Barang bukti tersebut meliputi atribut yang me-

nyerupai seragam dan tanda pengenal Kepolisian Jepang, puluhan unit telepon genggam dan perangkat komputer, perangkat penguat (*booster*) serta pengacak sinyal, dan berbagai perangkat elektronik pendukung lainnya.

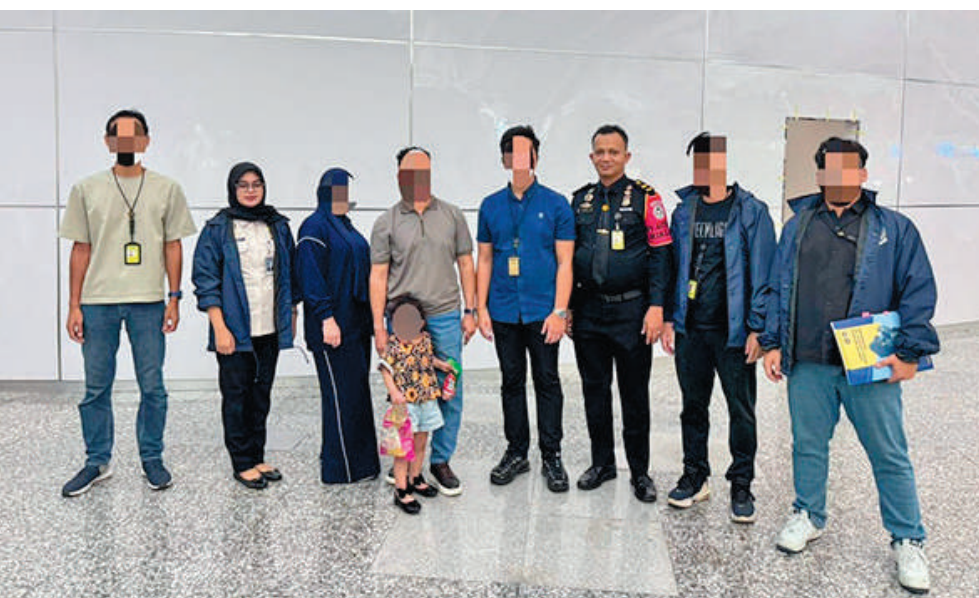
"Petugas kami akan mendalami pemeriksaan terhadap yang bersangkutan serta berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk kepolisian dan perwakilan negara terkait, apabila ditemukan unsur tindak pidana yang lebih luas," ujar Ritus.

Ketiga belas WN Jepang tersebut saat ini telah dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor untuk menjalani pemeriksaan intensif (BAP). Pemeriksaan tersebut difokuskan pada penyalahgunaan izin tinggal sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta pendalaman atas dugaan tindak pidana penipuan lintas negara. ■

Penulis: Radiana Riangadewi

Plt. Dirjen Imigrasi Yuldi Yusman, Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra, dan Kepala Kantor Imigrasi Bogor Ritus Ramadhana menunjukkan bukti kasus saat konferensi pers penangkapan 13 WN Jepang. (Foto: Arif Rahman Suryaman)





Imigrasi Ngurah Rai mendeportasi satu keluarga WN Irak yang menggunakan paspor palsu. (Foto: Dok. Kanim Ngurah Rai)

Gunakan Paspor Belgia Palsu, Satu Keluarga WN Irak Dideportasi

Satu keluarga WN Irak dideportasi dari Bali karena kedapatan membawa paspor Belgia palsu. Imigrasi memperingatkan modus ini berpotensi meningkat seiring eksodus warga dari wilayah konflik.

Satu keluarga yang terdiri atas tiga warga negara (WN) Irak dideportasi dari Bali setelah kedapatan berusaha memasuki wilayah Indonesia menggunakan paspor Belgia palsu. Ketiganya dipulangkan melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada Senin (2/3) malam.

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bugie Kurniawan mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari kejelian petugas di konter pemeriksaan imigrasi. Petugas melakukan *profiling* terhadap pelintas dan mencurigai keabsahan dokumen yang dibawa.

"Kecurigaan petugas ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lanjutan di Laboratorium Forensik Keimigrasian. Hasilnya, paspor Belgia yang dibawa oleh satu keluarga asal Irak tersebut terdeteksi sebagai dokumen palsu," ujar Bugie di Badung pada Selasa (3/3).

Ketiga WN Irak tersebut langsung diserahkan ke Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Intel-dakim) untuk pemeriksaan mendalam. Meskipun menggunakan dokumen palsu, hasil pengecekan pada sistem pusat data keimigrasian dan jaringan

internasional menunjukkan mereka tidak masuk dalam daftar cecak maupun daftar HIT Interpol.

Bugie memperingatkan bahwa modus seperti ini berpotensi meningkat di masa depan. "Hal ini sangat mungkin terjadi sebagai bentuk eksodus besar-besaran warga negara dari wilayah konflik Timur Tengah untuk memasuki negara lain yang dianggap aman dengan berbagai cara," tegasnya.

Mengingat anggota keluarga tersebut melibatkan seorang wanita dan balita, pihak Imigrasi memastikan seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara humanis dan berlandaskan prinsip hak asasi manusia (HAM). Kebutuhan dasar serta kenyamanan ibu dan anak tersebut tetap menjadi prioritas selama masa penahanan kasus.

Setelah seluruh proses administrasi rampung, ketiga WN Irak tersebut dideportasi menggunakan maskapai AirAsia AK375 rute Denpasar-Kuala Lumpur pada pukul 21.05 WITA. ■

Penulis: Harjisito Dani

Teliti Flora Endemik Tanpa Izin, Pria Jerman Dideportasi

Seorang pria asal Jerman dideportasi Imigrasi Palu karena meneliti flora endemik di Taman Nasional Lore Lindu tanpa izin.

Seorang warga negara (WN) Jerman dideportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu, Sulawesi Tengah, setelah terbukti melakukan penelitian ilegal di kawasan Taman Nasional Lore Lindu. Pria berinisial VAT tersebut kedapatan mengumpulkan sampel flora endemik tanpa mengantongi izin resmi dari otoritas terkait.

Kepala Kantor Imigrasi Palu Muhammad Akmal dalam keterangannya pada Senin (23/3) menjelaskan, tindakan administratif keimigrasian (TAK) ini diambil karena VAT menyalahgunakan izin tinggalnya. Berdasarkan pemeriksaan, VAT masuk ke Indonesia menggunakan *visa on arrival* (VoA), dokumen yang tidak diperuntukkan bagi kegiatan penelitian atau pengambilan sampel sumber daya alam (SDA).

"Yang bersangkutan kedapatan membawa sejumlah sampel tumbuhan hasil pengumpulan dari lokasi tanpa izin, termasuk dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)," ujar Akmal. Ia juga menambahkan bahwa setiap kegiatan warga negara asing (WNA) di Indonesia wajib dilakukan dengan mengikuti prosedur yang berlaku, tidak terkecuali kegiatan penelitian.

Akibat pelanggaran tersebut, VAT kini telah dideportasi dan namanya dimasukkan ke dalam daftar penangkalan. Dengan status tersebut, ia dilarang memasuki wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penulis: Dhai Priyambudhi

VAT (berbaju merah) dideportasi Kantor Imigrasi Palu karena meneliti flora endemik tanpa izin. (Foto: Dok. Kanim Palu)



Satu Keluarga Asal Yaman Gunakan Dokumen Perusahaan Fiktif untuk Dapatkan ITAS

Satu keluarga asal Yaman dideportasi Imigrasi akibat memberikan keterangan tidak benar dalam pengajuan izin tinggal. Namun, proses pemulangan terkendala situasi geopolitik di Timur Tengah yang tengah berkonflik.

Kantor Imigrasi Muara Enim mengungkap dugaan pelanggaran keimigrasian serius yang dilakukan oleh satu keluarga warga negara (WN) Yaman berinisial ME, HA, dan GM. Ketiganya terjaring dalam operasi pengawasan setelah diketahui menggunakan

dokumen perusahaan fiktif untuk memperoleh izin tinggal terbatas (ITAS) sebagai investor.

"Kami menemukan bahwa sponsor perusahaan yang digunakan untuk permohonan izin tinggal investor tersebut tidak memiliki aktivitas nyata. Setelah pengecekan lapangan, alamat

PETUGAS MENCURIGAI ME, YANG BERSTATUS SEBAGAI PENANAM MODAL ASING, TIDAK MAMPU MENJELASKAN OPERASIONAL PERUSAHAANNYA.

yang tercantum di Jakarta Barat ternyata merupakan rumah pribadi, bukan kantor perusahaan," ujar Kepala Kantor Imigrasi Muara Enim Ragil Putra Dewa dalam konferensi pers pada Senin (9/3).

Kasus ini bermula dari Operasi Pengawasan Keimigrasian pada 19 Februari 2026 di Kabupaten Lahat. Petugas mencurigai ME, yang berstatus sebagai penanam modal asing, tidak mampu menjelaskan operasional perusahaannya. Alih-alih menjalankan investasi besar, ME justru diketahui beraktivitas sebagai penjual madu di wilayah Lahat.

Meskipun secara administratif dokumen perusahaan—seperti akta notaris dan nomor induk berusaha (NIB)—terlihat lengkap pada saat pengajuan alih status, validasi di lapangan membuktikan adanya keterangan yang tidak benar. ME terbukti melanggar Pasal 123 Huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Atas pelanggaran tersebut, Kantor Imigrasi Muara Enim menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian (TAK) berupa deportasi sesuai dengan Pasal 75 ayat (2) Huruf f Undang-Undang Keimigrasian. Namun, proses pemulangan ke negara asal belum dapat dilakukan seketika.

"Mempertimbangkan kondisi keluarga dan situasi geopolitik di Timur Tengah yang tengah berkonflik, pemulangan saat ini mengalami kendala teknis. Untuk sementara, yang bersangkutan diizinkan tinggal di kediamannya di Lahat dengan pengawasan ketat dari petugas dan masyarakat sekitar," papar Ragil. ■

Penulis: Tasya Nandra Alipiah

Kepala Kantor Imigrasi Muara Enim Ragil Putra Dewa (kedua dari kanan) menunjukkan bukti dugaan pelanggaran keimigrasian oleh satu keluarga asal Yaman. (Foto: Dok. Kanim Muara Enim)





Petugas Imigrasi Bekasi menginterogasi WNA yang tertangkap dalam operasi pengawasan di Apartemen Kemang View. (Foto: Dok. Kanim Bekasi)

Imigrasi Bekasi Amankan 5 WNA: Satu Orang Tinggal Lajak Lebih dari 8 Tahun

Imigrasi Bekasi amankan lima warga Nigeria di Apartemen Kemang View dengan salah satunya tercatat tinggal lajak lebih dari delapan tahun. Dua pria lainnya diduga menggunakan perusahaan sponsor fiktif untuk mendapatkan izin tinggal investor.

Kantor Imigrasi Bekasi mengamankan lima warga negara (WN) Nigeria dalam operasi pengawasan keimigrasian di Apartemen Kemang View, Bekasi Selatan, pada Senin (6/4) malam. Kelima pria tersebut diduga melakukan pelanggaran berat,

yaitu investasi fiktif dan masa tinggal berlebih atau tinggal lajak (*overstay*) hingga ribuan hari.

"Penangkapan ini adalah buah ketajaman intuisi petugas kami dalam mendeteksi aktivitas orang asing yang tidak tertib. Pengawasan akan terus kami

perketat demi menjaga Bekasi tetap kondusif dari gangguan ketertiban oleh orang asing," jelas Kepala Kantor Imigrasi Bekasi Anggi Wicaksono.

Dalam operasi yang berlangsung pada pukul 23.00 WIB tersebut, petugas awalnya mengamankan dua pria berinisial OJN dan OMN. Meskipun memiliki izin tinggal investor, keduanya diduga kuat menggunakan perusahaan sponsor fiktif untuk menetap di Indonesia. Penelusuran berlanjut dengan penangkapan tiga WN Nigeria lainnya, yakni OCO, CLA, dan OJC. Berdasarkan pengecekan data sistem keimigrasian, ketiganya terbukti telah melampaui masa izin tinggal.

Data Imigrasi mencatat OCO telah tinggal melebihi izin selama 3.073 hari atau lebih dari delapan tahun sejak 2017. Sementara itu, CLA dan OJC masing-masing tercatat memiliki masa tinggal berlebih selama 1.144 hari dan 199 hari. Pelanggaran ini merujuk pada Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyebutkan bahwa masa tinggal orang asing tidak dapat lebih dari 60 hari, serta Pasal 123 huruf b mengenai pemberian keterangan tidak benar untuk memperoleh izin tinggal.

Saat ini, kelima WN Nigeria tersebut berada di Kantor Imigrasi Bekasi untuk menjalani pemeriksaan mendalam. Pihak Imigrasi sedang menyiapkan tindakan administratif keimigrasian (TAK) berupa deportasi dan pencantuman nama dalam daftar penangkalan. ■

Penulis: Elisha Agustina Gunawan

Imigrasi Serahkan Tiga WN Australia ke Kejaksaan

Imigrasi menyerahkan tiga WN Australia ke Kejaksaan untuk menjalani peradilan atas kasus penerbangan ilegal dari Cairns ke Merauke.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menyerahkan tiga warga negara (WN) Australia berinisial ZA, DTL, dan JVD ke Kejaksaan Republik Indonesia untuk menjalani proses peradilan setelah berkas penyidikan mereka dinyatakan lengkap (P-21) pada Rabu (8/4). Ketiga orang tersebut merupakan penumpang pesawat yang mendarat di Merauke, Papua, tanpa dokumen perjalanan dan visa yang sah pada November 2025.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Dirwasdakim) Yuldi Yusman menjelaskan, kasus ini bermula pada 17 November 2025 ketika sebuah pesawat jenis Piper PA 23-250 Aztec dengan nomor registrasi VH-EQD mendarat di Merauke.

"Pesawat yang diterbangkan oleh JVD tersebut diketahui bertolak dari Cairns, Australia. Sebelum mencapai Merauke, pesawat sempat transit di landasan pacu Port Stewart, Australia (sebuah area tanpa petugas imigrasi) untuk mengangkut ZA dan DTL yang tidak memiliki dokumen perjalanan (paspor) maupun visa Indonesia," ungkap Yuldi.

Selama masa penyidikan, ketiga tersangka dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat. Setelah berkas penyidikan dinyatakan lengkap, para tersangka beserta barang bukti diserahkan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Merauke untuk menjalani proses peradilan. Selain ketiga warga negara asing (WNA) tersebut, satu orang pilot warga negara Indonesia (WNI) masih

dalam tahap pengembangan penyidikan. Dalam proses penyidikan ini, pihak Imigrasi juga berkoordinasi dengan pemerintah Australia terkait keterlibatan perusahaan penerbangan atas nama Stirling Helicopters, yang selanjutnya berujung pada proses pidana terhadap pemilik perusahaan tersebut.

ZA dan DTL dijerat dengan Pasal 119 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena masuk ke wilayah Indonesia tanpa dokumen sah. Sementara itu, pilot yang berinisial JVD dikenakan pasal berlapis atas perannya yang memberikan bantuan dalam tindak pidana. Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan bahwa penegakan hukum ini merupakan bentuk perlindungan terhadap kedaulatan wilayah. ■

Penulis: Elyan Nadian Zahara



Buron asal Portugal yang ditangkap di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan saat dibawa ke Ditjen Imigrasi untuk menjalani pemeriksaan (Foto: Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi)

Yusman menjelaskan kronologi kedatangan MG ke Indonesia.

"MG pertama kali datang ke Indonesia pada 10 Juni 2025, sebelum diterbitkannya Keputusan European Court of Human Rights. MG sempat menggunakan izin tinggal kunjungan selama dua bulan sebelum akhirnya menggunakan izin tinggal terbatas bagi pekerja jarak jauh (*remote worker*) yang akan berakhir pada 8 Juli 2026," papar Yuldi.

Berdasarkan catatan kepolisian internasional, MG terlibat dalam kasus pembunuhan sadis di Algoz, Portugal, pada Maret 2020. Ia bersama rekannya, MD, diduga melakukan pembunuhan berencana terhadap seorang pria berinisial DG demi menguasai uang kompensasi milik korban senilai €70.000 atau Rp1,14 miliar. Modus operandi yang dilakukan tergolong kejam, meliputi pembiusan, pencekikan, hingga upaya memutilasi bagian tubuh korban untuk mengakses data perbankan pada ponsel korban sebelum membuang jenazahnya ke laut. MG dan MD adalah rekan kerja

IMIGRASI TANGKAP BURON PEMBUNUHAN SADIS ASAL PORTUGAL DI JAKARTA SELATAN

Buronan kasus pembunuhan asal Portugal berinisial MG akhirnya diringkus di Jakarta Selatan saat hendak mengurus izin tinggal. Penangkapan ini menjadi bukti keberhasilan sinergi otoritas keamanan dalam memburu pelaku kejahatan lintas negara.

■ Penulis: Elyan Nadian Zahara

MG, perempuan 30 tahun asal Portugal, harus mengakhiri pelarian dari jerat hukum di negara asalnya. Buronan kasus pembunuhan berencana ini berhasil diringkus oleh tim gabungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi dan Kantor Imigrasi (Kanim) Jakarta Selatan yang bekerja sama dengan tim SES NCB Interpol Indonesia saat akan mengurus dokumen izin tinggal. MG ditangkap pada Kamis (5/3) setelah keberadaannya terlacak di wilayah Jakarta. Penangkapan ini menandai keberhasilan sinergi otoritas keamanan dalam memburu pelaku kejahatan internasional yang mencoba bersembunyi di Indonesia.

Kronologi penangkapan bermula saat intelijen keimigrasian mendapatkan informasi bahwa MG akan mendatangi Kanim Jakarta Selatan untuk mengurus dokumen keimigrasian. Tim gabungan kemudian melakukan pemantauan ketat di lokasi sejak pagi hari. Tepat pukul 10.00 WIB, MG tiba di lokasi dan langsung diamankan oleh petugas.

Penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari surat permohonan bantuan penangkapan dan penahanan subjek Interpol Red Notice atas nama MG yang diterbitkan oleh Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri pada 24 Februari 2026. Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Yuldi

di sebuah rumah sakit di Portugal. MG berprofesi sebagai perawat, sementara rekannya adalah petugas keamanan di rumah sakit tersebut.

"Saat ini, yang bersangkutan telah dibawa ke Ditjen Imigrasi untuk pemeriksaan lebih lanjut dan pendeteksian. MG akan kami deportasi hari ini (Senin, 9 Maret 2026)," tutup Yuldi. ■

Buron asal Portugal yang ditangkap di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan saat dibawa ke Ditjen Imigrasi untuk menjalani pemeriksaan (Foto: Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi)



Selama dua pekan pada awal Maret 2026, Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas II TPI Belawan mendeportasi empat warga negara asing (WNA). WNA asal Belgia dan Korea Selatan tersebut dipulangkan secara paksa setelah terbukti melanggar izin tinggal dan menyalahgunakan dokumen keimigrasian di wilayah Sumatra Utara.

Kasus terbaru melibatkan seorang pria asal Belgia berinisial NEB. Ia dideportasi melalui Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, pada Sabtu (14/3). NEB diketahui tinggal lajak (*overstay*) selama 75 hari dari jadwal yang seharusnya.

Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Kelas II TPI Belawan Eko Yudis Parlin Rajagukguk menyatakan penindakan ini berawal dari laporan masyarakat di Medan. NEB masuk ke Indonesia sejak 27 November 2025 menggunakan *visa on arrival* (VoA) untuk tujuan wisata.

"Karena yang bersangkutan berada di wilayah Indonesia lebih dari 60 hari dari batas waktu izin tinggal, [ia] dikenakan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Selain dideportasi, ia masuk dalam daftar tangkal selama lima tahun," ujar Eko.

Pada Rabu (4/3), pihak Imigrasi juga mendeportasi tiga warga negara (WN) Korea Selatan berinisial SK, GC, dan LNY. Ketiganya dipulangkan melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Seoul menggunakan maskapai Asiana Airlines.

Berbeda dengan kasus NEB, ketiga WNA Korea Selatan ini memegang izin



Deportasi WN Korea Selatan (Foto: Dok. Kanim Belawan)

IMIGRASI BELAWAN DEPORTASI EMPAT WNA PELANGGAR KETENTUAN IZIN TINGGAL

Empat warga negara asing asal Belgia dan Korea Selatan dideportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan setelah terbukti melanggar ketentuan izin tinggal keimigrasian. Penindakan oleh Kantor Imigrasi Belawan ini menunjukkan komitmen Imigrasi dalam mengawasi orang asing dan menjaga kedaulatan negara.

■ Penulis: Muhammad Taufik, Roslina Handayani

tinggal investor sejak 2024 dengan penjamin PT B di Medan. Namun, berdasarkan verifikasi lapangan dan penelusuran sistem, petugas tidak menemukan keberadaan fisik bangunan maupun aktivitas perusahaan penjamin tersebut.

"Selama dua tahun di Indonesia, ketiganya hanya melakukan kegiatan belajar bahasa Indonesia. Tidak ada kegiatan investasi sebagaimana tujuan awal pemberian izin tinggal," ungkap Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Belawan.

Ketiganya dinyatakan melanggar Pasal 122 UU Nomor 6 Tahun 2011 terkait

penyalahgunaan izin tinggal. Ancaman pidana untuk pelanggaran ini mencapai lima tahun penjara dan denda Rp500 juta, tetapi otoritas mengambil langkah administratif berupa deportasi dan penangkalan.

Eko menegaskan bahwa pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerja Belawan akan terus ditingkatkan.

"Penegakan hukum ini adalah bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara dan memastikan setiap orang asing patuh pada aturan yang berlaku di Indonesia," tegasnya. ■

Deportasi WN Belgia (Foto: Dok. Kanim Belawan)



Bersaing di Tingkat Global: **IMIGRASI SOEKARNO-HATTA RAIH KEMBALI 10 BESAR WORLD AIRPORT AWARDS**

Imigrasi Soekarno-Hatta kembali menorehkan prestasi di ajang Skytrax World Airport Awards 2026. Keberhasilan mempertahankan peringkat sepuluh besar dunia selama dua tahun berturut-turut menegaskan stabilitas kualitas layanan imigrasi Indonesia di tengah ketatnya persaingan global.

■ Penulis: Prama Yogi

"Sekarang, masyarakat akan merasakan pemeriksaan keimigrasian yang lebih aman, cepat, hangat, dan *seamless*," ungkap Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta Galih Priya Kartika Perdhana pada Kamis (19/3).

Pernyataan tersebut mengiringi keberhasilan layanan keimigrasian Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang kembali mengukuhkan posisinya di peringkat ke-10 layanan imigrasi bandara terbaik dunia dalam ajang Skytrax World Airport Awards 2026. Prestasi ini diumumkan secara resmi pada World Airport Awards Ceremony yang menjadi bagian dari rangkaian Passenger Terminal Expo (PTE) World di London, Inggris, Rabu (18/3).

Capaian ini menandai konsistensi Indonesia dalam mempertahankan posisi di jajaran elite global selama dua tahun berturut-turut. Keberhasilan tersebut menyejajarkan Indonesia de-

ngan bandara-bandara ternama dunia, seperti Bandara Changi Singapura, Bandara Internasional Bahrain, hingga Bandara Internasional Hong Kong. Hal ini menjadi catatan signifikan mengingat ketatnya persaingan global yang membuat sejumlah bandara besar dunia mengalami pergeseran peringkat di tahun ini.

Penilaian independen yang dilakukan Skytrax didasarkan pada World Airport Survey yang melibatkan pengguna jasa dari lebih dari 100 kewarganegaraan sepanjang periode Agustus 2025 hingga Februari 2026. Indikator utama yang menjadi sorotan meliputi efisiensi waktu tunggu, ketersediaan jalur prioritas, serta profesionalisme petugas di garda terdepan. Salah satu faktor kunci keberhasilan ini adalah optimalisasi teknologi pintu perlintasan otomatis (*autogate*) yang kini didorong penggunaannya hingga mencapai 80 persen untuk meminimalkan kepadatan antrean.

Galih menjelaskan bahwa prestasi tersebut diraih di tengah standar global yang terus meningkat. Menurutnya, inovasi yang dilakukan Imigrasi di berbagai negara menuntut Indonesia untuk tidak berhenti berbenah. Perbaikan layanan ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelaku perjalanan sekaligus memperkuat citra Imigrasi sebagai pintu gerbang utama Indonesia di mata dunia.

Fokus ke depan bukan lagi sekadar mengejar target tahunan, melainkan memastikan standar pelayanan kelas dunia tersebut menjadi budaya kerja yang berkelanjutan. Transformasi digital dan penguatan pelayanan berbasis teknologi menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kualitas layanan publik di bandara tersibuk di Indonesia ini.

Menteri Imigrasi dan Pemasaran Agus Andrianto menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh jajaran. Menurutnya, penghargaan ini menunjukkan pentingnya transformasi digital dalam meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional. Pemerintah berkomitmen untuk terus berinovasi guna memperkuat kualitas layanan keimigrasian di masa mendatang. ■

Suasana *autogate* di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Foto: Jimmy Asmoro)



Dalam ekosistem komunikasi digital yang bergerak cepat, kepercayaan publik (*public trust*) kini menjadi aset paling krusial bagi instansi pemerintah. Menyadari hal tersebut, Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Pontianak kembali menyelenggarakan agenda Public Relation, Enhancement, Management and Networking (PREMAN) jilid kedua di Hotel Golden Tulip Pontianak pada Selasa (7/4).

Acara berslogan “No Trust, No Impact” ini dihadiri oleh 83 perwakilan instansi strategis, mulai dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, hingga Ditjen Pajak. Unikanya, kegiatan tahun ini mengusung nuansa akulturasi budaya lokal melalui tema dan kode busana (*dress code*) oriental. Atmosfer hangat kian terasa saat atraksi barongsai



Kepala Kantor Imigrasi Pontianak Sam Fernando memberikan sambutan pada pembukaan acara. (Foto: Dok. Kanim Pontianak)

No Trust, No Impact: STRATEGI HUMAS PEMERINTAH MEMENANGKAN KEPERCAYAAN PUBLIK

Citra instansi tidak cukup dibangun dengan logo dan identitas visual. Imigrasi Pontianak membuktikan bahwa kepastian layanan adalah fondasi utama kredibilitas di mata publik.

■ Penulis: Yuliana A. Siringey

membuka acara, yang kemudian dilanjutkan dengan peresmian acara secara simbolis melalui pemukulan gong oleh Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Pontianak Sam Fernando.

Navigasi Krisis dan Simplifikasi Pesan

Sesi materi dibuka oleh Ketua Tim Pengelola Komunikasi Publik dari Ditjen Imigrasi Yolanda yang membedah urgensi manajemen krisis kehumasan. Ia menekankan bahwa sebuah isu kecil yang tidak teridentifikasi sejak dini berpotensi menjadi krisis yang mengancam stabilitas institusi. Oleh karena itu, langkah preventif dan strategi komunikasi yang tepat menjadi kunci utama dalam menjaga reputasi.

Senada dengan hal tersebut, narasumber Dimas Zainuddin menyoroti aspek strategi komunikasi media sosial. Menurutnya, tantangan

terbesar humas pemerintah saat ini adalah melakukan simplifikasi pesan. Kebijakan publik yang bersifat kompleks harus mampu diterjemahkan ke dalam bahasa yang lebih sederhana agar efektif menjangkau masyarakat luas tanpa mengurangi esensi informasi.

Penjenamaan melalui Kepastian Layanan

Dari sisi penjenamaan, narasumber Rendy Firnanda menegaskan bahwa citra instansi tidak hanya dibangun melalui identitas visual, tetapi juga melalui konsistensi layanan. Ia mencontohkan bagaimana Imigrasi Pontianak membangun reputasi positif melalui pengelolaan pusat kontak (*contact center*) yang responsif serta komitmen penyelesaian paspor dalam empat hari kerja. Sinkronisasi antara “janji” layanan dan realitas di lapangan merupakan fondasi utama dalam membangun kredibilitas.

Optimalisasi Media Sosial Berbasis Data

Sebagai penutup, narasumber Arif memaparkan pentingnya pengelolaan media sosial berbasis data. Ia menekankan bahwa peran humas bukan sekadar mengunggah konten, melainkan harus mampu memanfaatkan wawasan demografi—seperti usia, wilayah, dan waktu aktif pengguna—untuk menentukan kanal yang paling tepat.

“Melalui teori Man-Gun, kita melihat bahwa selain penguasaan alat atau platform, kesiapan sumber daya manusia (SDM) adalah variabel penentu. Di Humas Imigrasi sendiri, Instagram dipilih sebagai kanal utama karena data menunjukkan interaksi masyarakat paling tinggi berada di sana,” jelas Arif.

Kegiatan ini berlangsung interaktif dengan partisipasi aktif para peserta dalam sesi diskusi. Momentum PREMAN 2026 ini diharapkan menjadi pijakan bagi humas lintas instansi di Kalimantan Barat untuk terus berkolaborasi, beradaptasi dengan tren teknologi, dan menghadirkan keterbukaan informasi publik yang lebih berkualitas. ■

Sosialisasi Pencegahan TPPO dan TPPM:

MEMBENTENGI MAHASISWA DARI JERAT PERBUDAKAN MODERN

Tawaran gaji besar di luar negeri tampak seperti jalan pintas untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Namun, kisah dua penyintas TPPO dan TPPM yang dibagikan di hadapan 40 mahasiswa di Palembang ini membuktikan bahwa di balik iming-iming itu, ada jerat perbudakan modern yang mengintai.

■ Penulis: Daffa Rahman

Tawaran gaji Rp10 juta per bulan untuk bekerja di Thailand bagi Ai-Bukhori terdengar seperti jalan keluar untuk memperbaiki kondisi ekonominya. Namun nyatanya, malang tak dapat

ditolak, mujur tak dapat diraih. Bukan imbalan 10 juta yang didapat, melainkan nasib malang. Alih-alih bekerja di gedung perkantoran, usai menempuh perjalanan panjang menggunakan bus dari Malaysia,

Bukhori ditempatkan di sebuah rumah di tengah hutan, jauh dari permukiman warga.

Di sana, di pedalaman Thailand, setiap hari Bukhori hanya diberi sepotong roti dan sebotol air. Selama

SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) DAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA (TPPM)

10 Maret 2026 | Ballroom Lt.2
THE ALTS HOTEL

Tiara, korban perdagangan orang asal Palembang (Foto: Dok. Kanim Palembang)

satu bulan, tubuhnya dipantau melalui serangkaian pemeriksaan medis yang tidak lazim. Belakangan ia sadar, dirinya bukan direkrut untuk bekerja, melainkan menjadi komoditas praktik perdagangan organ tubuh.

"Saya curiga dan merasa terancam, lalu memutuskan melarikan diri diam-diam," kenang Bukhori saat membagikan kisahnya dalam sosialisasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia (TPPM) di The Alts Hotel Palembang, Selasa (10/3). Pelariannya membuahkan hasil setelah ia bertemu dan dibantu seorang kepala desa setempat yang menghubungkannya dengan pihak kepolisian dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).

Jerat Digital dan Kerja Paksa

Cerita serupa dengan modus berbeda dialami oleh Tiara yang juga mengisi sesi berbagi (*sharing session*) dalam acara sosialisasi tersebut. Ketertarikan pada lowongan kerja sebagai admin di Dubai yang diketahui Tiara melalui Telegram membawanya melintasi tiga negara: Uni Emirat Arab, Thailand, dan Laos.

Tiara berangkat ke Jakarta menggunakan biaya pribadi yang dijanjikan akan diganti. Dari Jakarta, perjalanan dilanjutkan ke Dubai. Di Dubai, Tiara baru menyadari bahwa pekerjaannya adalah penipu (*scammer*) investasi palsu. Dua minggu kemudian, ia dipindahkan ke Mewadi, sebuah lokasi terpencil di hutan Thailand yang dikendalikan oleh sindikat lintas negara. Di sana, jam kerja diatur secara tidak manusiawi, mulai pukul 02.00

dini hari hingga siang hari.

Sanksi fisik menjadi bagian dari keseharian jika target tidak tercapai. "Ada hukuman naik turun tangga 20 kali, disetrum jika satu bulan tidak capai target, hingga dipukul di ruangan khusus bagi yang berani melawan," tuturnya.

Tiara bahkan sempat "dijual" ke Laos karena dianggap tidak produktif. Ia berada di sana selama sekitar dua bulan dan tetap dipaksa bekerja sebagai penipu. Para pekerja lain tidak diperbolehkan memegang ponsel, tetapi Tiara mendapat pengecualian karena disangka sebagai warga Myanmar.

Selama bekerja, Tiara tidak pernah menerima gaji dan hanya diberikan makanan berupa daging nonhalal. Saat ingin pulang dan berhenti bekerja, ia diharuskan membayar denda sejumlah Rp200 juta.

Tiara akhirnya bisa menyelamatkan diri setelah berhasil melapor ke Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melalui ponsel yang ia simpan secara sembunyi-sembunyi. Berkat respons cepat dari pihak KBRI dan pemerintah Indonesia, termasuk perhatian dari Presiden, Tiara akhirnya berhasil diselamatkan dan dipulangkan ke Indonesia.

Modus Perdagangan Orang pada Era Digital

Kisah kelam para penyintas menjadi "alarm keras" dalam sosialisasi pencegahan TPPO dan TPPM yang dihadiri oleh 40 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Palembang. Kini, perdagangan orang tidak lagi sebatas paksaan fisik tradisional, tetapi sudah merambah hingga manipulasi digital.

Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Selatan Waydinsyah, salah satu narasumber dalam sosialisasi ini, menyoroti pergeseran tren yang menjadikan media sosial sebagai alat utama rekrutmen ilegal. "Targetnya adalah generasi muda yang mencari kerja. Mereka diiming-imingi gaji besar, tetapi realitasnya justru disekap dan dipaksa menjadi operator penipuan daring (*online scam*) atau judi daring," jelasnya.

Waydinsyah menekankan pentingnya mengenali tanda bahaya sejak awal, seperti tawaran kerja tanpa kualifikasi yang jelas. Selain itu, prosedur keberangkatan yang

KINI, PERDAGANGAN ORANG TIDAK LAGI SEBATAS PAKSAAN FISIK TRADISIONAL, TETAPI SUDAH MERAMBAH HINGGA MANIPULASI DIGITAL.

menutup-nutupi dokumen resmi atau paspor juga merupakan indikasi TPPO dan TPPM yang perlu diwaspadai dari awal oleh para pencari kerja.

Data Polda Sumatera Selatan menunjukkan bahwa tren kasus TPPO sepanjang 2023–2025 terus mengalami fluktuasi dengan modus yang kian rapi. Kepala Unit 1 Subdirektorat 3 Perlindungan Perdagangan Orang (PPO) Kepolisian Daerah Sumatera Selatan M.P. Tamba memaparkan bahwa pemulangan pekerja migran nonprosedural sering kali terkendala oleh minimnya dokumen sah milik korban.

Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Palembang Khairil Mirza menegaskan bahwa dalam konteks perdagangan orang, fungsi Imigrasi bukan sekadar mengelola urusan administratif, melainkan juga memberikan perlindungan. Pengawasan ketat pada lalu lintas orang di gerbang internasional menjadi filter pertama untuk mendeteksi potensi korban sebelum mereka melewati batas negara.

"Perdagangan orang adalah kejahatan transnasional yang merampas hak asasi paling dasar. Melalui mahasiswa, yang kami harapkan bisa menjadi agen perubahan, kami membangun sistem peringatan dini di masyarakat agar tidak ada lagi warga Sumatra Selatan yang terjerumus dalam lubang yang sama," ujar Mirza.

Sosialisasi ini ditutup dengan sesi interaktif yang memperlihatkan keresahan mahasiswa terhadap keamanan prosedur kerja ke luar negeri. Pendidikan bagi calon pekerja migran dan kewaspadaan terhadap iklan lowongan kerja di internet menjadi poin krusial yang harus disebarluaskan. Melalui pendekatan berbasis komunitas ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga berperan aktif memutus mata rantai informasi menyesatkan. ■



Dialog dengan Media:

DIRJEN IMIGRASI TEGASKAN SEMANGAT "IMIGRASI UNTUK RAKYAT"

Transparansi dan responsif adalah dua kunci yang ditekankan oleh Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko yang baru dilantik. Dalam pertemuan bersama para perwakilan media massa, ia menegaskan komitmen kuat pada fokus Imigrasi yang berorientasi untuk kebermanfaatan bagi masyarakat.

■ Penulis: Jimmy Asmoro

Memasuki hari ke-17 masa jabatannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Hendarsam Marantoko membawa napas baru dalam tata kelola keimigrasian nasional. Dalam pertemuan dengan pimpinan redaksi dari 31 media arus utama di Bimasena Club, Jakarta, pada Jumat (17/4), Hendarsam menegaskan pergeseran paradigma institusi Imigrasi yang kini berorientasi pada kebermanfaatan bagi masyarakat.

Pada forum tersebut, beberapa tokoh media nasional turut hadir, antara lain, Aiman Witjaksono dari iNews Media Group, Muhammad Toriq dari Kumparan, hingga Wakil Pemimpin Redaksi (Pemred) AFP Mariëtte Le Roux. Di hadapan mereka, Hendarsam memaparkan empat fungsi pokok yang menjadi fondasi kinerjanya, yaitu

pelayanan masyarakat, penegakan hukum, keamanan negara, serta fasilitasi pembangunan.

"Semua fungsi Imigrasi—pelayanan, penegakan hukum, keamanan, maupun fasilitasi pembangunan—orientasinya adalah untuk rakyat Indonesia," ujar Hendarsam saat menyampaikan arah kebijakan barunya.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi kini mengintensifkan sejumlah langkah strategis dalam upaya penguatan perannya di masyarakat. Beberapa di antaranya mencakup pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Haji Ilegal, Satgas Patroli Dharma Dewata untuk menangani warga negara asing (WNA) bermasalah di Bali, hingga Satgas Patroli Tambang. Selain itu, terdapat Operasi Wira Waspada untuk melindungi masyarakat dari

potensi gangguan orang asing melalui penindakan yang lebih terjadwal.

Sesi tanya jawab berlangsung dinamis ketika sejumlah pemred menggali lebih dalam komitmen institusi. Uni Lubis dari IDN Times mempertanyakan strategi peningkatan peringkat paspor Indonesia di dunia. Menanggapi hal tersebut, Hendarsam menjawab, "Kami akan memperkuat fungsi diplomatik Imigrasi agar setara dengan diplomasi luar negeri, sekaligus membenahi rekam jejak warga negara kita di luar negeri seperti kasus tinggal lajak (*overstay*)."

Tak hanya itu, isu *golden visa* turut menjadi sorotan. Saat ditanya oleh Suarjono dari Suara.com terkait efektivitas program tersebut, Hendarsam menegaskan, "Kami bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan investasi yang masuk benar-benar transparan dan memberikan manfaat nyata, bukan sekadar angka di atas kertas."

Terkait maraknya kasus WNA bermasalah, Hendarsam menjelaskan bahwa pihaknya telah menetapkan sejumlah negara sebagai zona merah dan mewajibkan pengawasan intensif terhadap warga negara tersebut di wilayah Indonesia.

Meski baru menakhodai lembaga ini dalam waktu singkat, Hendarsam menunjukkan keseriusannya dalam mengonsolidasikan strategi Imigrasi. Ia mengakui bahwa ia harus bisa cepat beradaptasi dengan ritme kerja barunya ini. Menurutnya, Imigrasi harus bertransformasi menjadi instrumen yang tidak hanya menjaga perbatasan, tetapi juga aktif berkontribusi bagi keamanan dan kesejahteraan bangsa. Ia menutup pertemuan dengan komitmen untuk tetap transparan dan responsif terhadap dinamika di lapangan demi menjaga martabat Indonesia di mata dunia. ■

Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko pada acara riung media bersama sejumlah pimpinan redaksi media massa (Foto: Alfiqri Anshari)





Petugas menunjukkan autogate di tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar. (Foto: Dok. Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi)

MENILIK WAJAH BARU IMIGRASI MAKASSAR

Peningkatan status kelembagaan menjadi momentum bagi Kantor Imigrasi Makassar untuk memangkas birokrasi. Penambahan kuota paspor, pemekaran wilayah kerja, hingga pemasangan *autogate* di bandara menjadi akselerasi transformasi layanan.

■ Penulis: Eka Safitri

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar melakukan perombakan layanan secara masif untuk menjawab kebutuhan masyarakat di Sulawesi Selatan. Langkah ini diambil seiring dengan peningkatan status kelembagaan kantor yang menuntut standar manajerial dan efisiensi operasional yang lebih tinggi.

Sejak Juli 2024, instansi ini resmi beroperasi sebagai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus. Perubahan nomenklatur ini menjadi momentum bagi pimpinan untuk melakukan akselerasi transformasi, mulai dari digitalisasi dokumen perjalanan hingga modernisasi sistem pengawasan di pintu masuk negara. Fokus utamanya adalah memangkas birokrasi dan mendekatkan layanan kepada masyarakat.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar Abdi Widodo menekankan bahwa kunci dari transformasi ini terletak pada penyatuan visi seluruh jajaran melalui

pendekatan yang berempati.

"Jangan takut kehilangan wilayah kerja untuk membangun kantor imigrasi yang baru karena kita perlu pengembangan organisasi agar pelayanan dan pendekatan layanan kepada masyarakat dapat optimal," ujarnya.

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan paspor, otoritas Imigrasi telah menaikkan kuota layanan dari 200 menjadi 300 permohonan per hari. Peningkatan ini didukung oleh optimalisasi aplikasi M-Paspor. Berkat edukasi intensif kepada masyarakat dan agen perjalanan umrah, tingkat penggunaan aplikasi digital ini kini mencapai 80 persen. Selain itu, jangkauan layanan diperluas melalui program jemput bola Eazy Passport ke berbagai kabupaten penyangga untuk memangkas jarak tempuh warga.

Strategi pengembangan organisasi juga dilakukan secara progresif. Salah satunya adalah dengan melakukan pemekaran wilayah kerja melalui pembentukan kantor imigrasi baru

di Kabupaten Bone dan Bantaeng. Kebijakan ini bertujuan memastikan standar pelayanan prima dapat dirasakan secara merata sekaligus memperkuat kehadiran negara di daerah-daerah yang selama ini akses layanannya terbatas.

Di sisi lain, modernisasi juga menyentuh aspek pengawasan perbatasan. Sejak 1 Januari 2026, sistem gerbang otomatis (*autogate*) telah dioperasikan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Teknologi ini hadir sebagai solusi strategis di tengah keterbatasan personel yang saat ini hanya berjumlah 160 orang dari kebutuhan ideal 260 orang.

Meskipun saat ini operasional *autogate* telah berjalan, peluncuran resminya masih menanti arahan dari pemerintah pusat. Integrasi teknologi ini diharapkan mampu memberikan pengalaman melintas yang lebih cepat dan akuntabel bagi pelaku perjalanan internasional.

"Kami berupaya memastikan bahwa seluruh aspek pelayanan, mulai dari kemudahan dokumen hingga pengawasan yang ketat, dapat berjalan beriringan guna mendukung pertumbuhan pariwisata dan ekonomi daerah di Gerbang Timur Indonesia," tutup Abdi. ■

KIAT PRAKTIS BEPERGIAN KE NEGARA BEBAS VISA

Walaupun sudah ada 88 negara yang bebas visa untuk WNI, kesiapan dokumen dan pemahaman aturan tetaplah prioritas utama. Agar perjalanan berjalan lancar dan nyaman, beberapa hal perlu dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan baik.

■ Penulis: Irnadika Natasia Tiominar

Berlibur kerap kali menjadi rencana banyak orang. Liburan adalah kesempatan untuk melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Tak hanya sekadar rehat, liburan juga menjadi momen untuk mencari inspirasi.

Berbagai destinasi liburan menjadi pilihan, salah satunya luar negeri. Menjelajah tempat baru memberikan angin segar bagi pikiran kita. Akan tetapi, visa acapkali dianggap sebagai sebuah halangan.

Kabar baiknya, ada negara-negara yang membebaskan visa bagi warga negara Indonesia (WNI). Pemegang paspor Indonesia kini dapat bepergian ke 88 negara tanpa perlu mengurus visa konvensional ke kedutaan. Namun, beberapa hal perlu dipertimbangkan dan dipersiapkan agar perjalanan ke luar negeri dapat dilalui dengan aman, nyaman, dan menyenangkan.

Mari simak kiat-kiat bepergian ke negara bebas visa di bawah ini.

1. Siapkan paspor.

Untuk dapat bepergian keluar negeri, WNI wajib memiliki paspor. Sebelum berangkat, pastikan paspor masih berlaku minimal enam bulan. Selain itu, paspor juga wajib dijaga agar tidak rusak. Wisatawan dengan paspor rusak dapat ditolak saat keberangkatan maupun kedatangan.

2. Cek ketentuan bebas visa.

Setiap negara memiliki ketentuan berbeda tentang bebas visa. Jangan lupa mengecek situs resmi Imigrasi negara tujuan. Hal-hal yang perlu diperhatikan, antara lain, prosedur mendapatkan bebas visa, dokumen persyaratan, dan lama waktu kunjungan yang diberikan dengan bebas visa. Sebagai contoh, Jepang memberlakukan bebas visa

dengan sistem registrasi prakeberangkatan bagi WNI pemegang paspor elektronik dengan waktu maksimal 15 hari per kunjungan.

3. Cek aturan kedatangan.

Beberapa negara mewajibkan setiap orang asing untuk mengisi kartu kedatangan (*arrival card*) sebelum masuk ke wilayahnya. Contohnya, Thailand mewajibkan wisatawan asing mengisi *Thailand Digital Arrival Card* (TDAC) tiga hari sebelum kedatangan.

4. Cari tahu daftar barang bawaan yang dilarang.

Beberapa barang yang legal beredar di Indonesia justru malah dilarang di negara lain. Cari tahu daftar barang yang dilarang beredar di negara tujuan. Jangan sampai uang belanja justru habis untuk membayar denda. Contohnya, berdasarkan informasi di situs *ica.gov.sg*, pemerintah Singapura melarang untuk membawa permen karet (*chewing gum*).

5. Siapkan tiket pulang pergi dan rencana perjalanan.

Kepemilikan tiket akan mendukung tujuan perjalanan sebagai wisatawan sehingga memudahkan dalam pemeriksaan keimigrasian baik di dalam maupun luar negeri. Rencana perjalanan yang jelas juga akan memudahkan dalam menyusun *budget* dan aktivitas selama di luar negeri.

6. Siapkan asuransi perjalanan.

Tidak ada yang mau sakit saat berlibur. Namun, sakit bisa datang kapan saja. Adanya asuransi perjalanan akan memudahkan wisatawan untuk mengakses layanan kesehatan. Sebelum berangkat, wisatawan dapat mendaftar asuransi perjalanan sesuai dengan waktu perjalanan. Selain itu, pastikan tubuh selalu dalam kondisi prima dengan istirahat cukup dan asupan makanan yang bergizi.

Jangan ragu untuk mencari informasi lengkap melalui situs web atau media sosial resmi keimigrasian negara tujuan. Kelancaran perjalanan bergantung pada kesiapan kita dalam merencanakannya. Selamat berlibur! ■



Festival Lentera (ilustrasi) (Sumber: vietnam.vn)

PEBISNIS INDONESIA KINI BISA URUS APEC BUSINESS TRAVEL CARD SECARA DARING

Mendapatkan ABTC kini makin mudah. Pebisnis Indonesia bisa mengajukan kartu perjalanan ini secara daring dan menikmati akses bebas visa ke 19 negara tanpa hambatan birokrasi.

■ Penulis: Ajeng Rahma Safitri

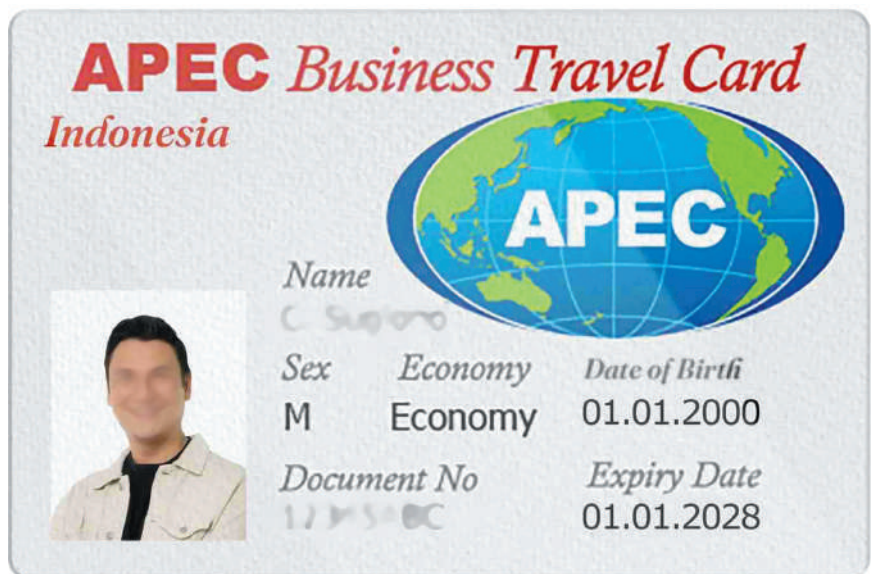
Pengurusan Kartu Perjalanan Pebisnis (KPP) APEC atau APEC Business Travel Card (ABTC) bagi warga negara Indonesia (WNI) kini dapat dilakukan sepenuhnya secara daring melalui situs abtcc.imigrasi.go.id. Langkah ini menggantikan sistem pengiriman berkas fisik dan pos elektronik (posel atau surel) yang sebelumnya dinilai kurang efisien.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Yuldi Yusman menjelaskan bahwa digitalisasi ini bertujuan untuk menciptakan proses permohonan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Fasilitas ini sangat strategis bagi pelaku bisnis Indonesia karena memberikan akses bebas visa ke 19 negara anggota APEC serta fasilitas jalur khusus (*special lane*) di berbagai bandara internasional.

"Keuntungan utamanya adalah pebisnis tidak perlu lagi mengajukan visa setiap kali bepergian. ABTC mendukung peningkatan iklim investasi dan kerja sama ekonomi internasional dengan menghilangkan hambatan birokrasi," ujar Yuldi pada Rabu (25/3).

Indonesia telah menandatangani keikutsertaan dalam skema KPP APEC atau ABTC ini sejak 15 Agustus 2002 di Acapulco, Meksiko, dan mulai mengimplementasikannya pada 1 Mei 2004. Fasilitas ini dirancang khusus untuk mempercepat mobilitas keluar-masuk negara bagi para pelaku bisnis yang sangat mementingkan efisiensi waktu.

Hingga saat ini, pemegang kartu ABTC dapat menikmati akses bebas visa di 19 negara anggota yang menerapkan skema tersebut, yang meliputi negara-negara di Asia Tenggara (Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, dan Vietnam), Asia Timur (Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, dan Taiwan) serta wilayah Pasifik dan Amerika.



Kartu Perjalanan Pebisnis (KPP) APEC atau APEC Business Travel Card (ABTC) (ilustrasi) (Sumber: legalregistr.info)

Sebagai catatan, meskipun Amerika Serikat dan Kanada merupakan anggota APEC, keduanya saat ini berstatus sebagai anggota transisi. Artinya, pemegang kartu ABTC memerlukan visa untuk masuk ke kedua negara tersebut, tetapi tetap berhak menikmati fasilitas jalur khusus (*fast track*) saat melewati pemeriksaan imigrasi di bandara internasional mereka.

Pelaku bisnis Indonesia dapat mengajukan layanan daring ini yang mencakup permohonan kartu baru, penggantian, hingga pembaruan data secara daring dengan prosedur sebagai berikut.

1. Registrasi Akun
Pemohon mendaftar di laman abtcc.imigrasi.go.id dengan mengunggah dokumen kependudukan (KTP, KK, akta kelahiran).
2. Pengisian Aplikasi
Pemohon melengkapi formulir sesuai kategori permohonan

(baru/penggantian/pembaruan).

3. Unggah Dokumen Pendukung
Pemohon mengunggah surat rekomendasi instansi/asosiasi pengusaha, paspor yang masih berlaku, dan foto terbaru.
4. Pembayaran dan Verifikasi
Pembayaran PNPB dilakukan melalui sistem SIMPONI. Setelah tervalidasi, berkas akan masuk ke tahap verifikasi petugas.
5. Pemantauan Status
Jika berkas disetujui, informasi kartu akan dikirimkan melalui ponsel dan progresnya dapat dipantau secara mandiri melalui situs tersebut.

Yuldi menegaskan bahwa dengan sistem baru ini, Ditjen Imigrasi memantapkan para pelaku bisnis dapat bergerak lebih cepat dan fokus pada ekspansi internasional tanpa kendala administratif yang berarti. ■

Paradoks Kebijakan Kewarganegaraan Indonesia:

ANTARA PRIVILESE PERSONAL DAN KONSEKUENSI SOSIAL

Hak istimewa memiliki dua kewarganegaraan tidak dirasakan secara setara oleh semua orang. Fasilitas negara untuk studi ke luar negeri justru memicu kecemburuan sosial dan paradoks dalam aturan kewarganegaraan Indonesia.

■ Penulis: Caesar Demas Edwinarta (pendiri dan peneliti @bahamasinstitute)

Permasalahan kewarganegaraan di Indonesia sering kali dianggap sebatas pada status administratif personal. Padahal, konsekuensi dari kepemilikan kewarganegaraan tersebut juga berdampak pada konstruksi sosial yang ada dalam masyarakat.

Setelah viralnya video penerimaan kewarganegaraan asing dari anak seorang warga negara Indonesia (WNI) berinisial DS yang tinggal dan menetap di Inggris, warganet mengkritisi etika sosial DS. Belakangan diketahui bahwa yang bersangkutan beserta suaminya merupakan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yaitu beasiswa resmi pemerintah Indonesia yang digunakan untuk melanjutkan studi ke luar negeri. DS kemudian berdalih bahwa kepemilikan kewarganegaraan asing bagi salah satu anaknya sah secara hukum karena berdasarkan asas *ius soli* yang diperoleh dengan pertimbangan bahwa anak tersebut lahir di Inggris dan didukung oleh sang suami yang berstatus sebagai penduduk tetap (*permanent resident*) di Inggris.

Berdasarkan aturan yang berlaku, pemberian kewarganegaraan Inggris bagi anak yang lahir di negara tersebut dapat dilaksanakan dalam kondisi salah satu di antara kedua orang tua anak itu memiliki izin tinggal tetap sekalipun kedua orang tuanya bukan merupakan warga negara (WN) Inggris. Hal ini juga memenuhi kaidah pemberian kewarganegaraan berdasarkan tanah kelahiran (*ius soli*) yang dianut oleh negara Indonesia sehingga dapat menjadikan anak tersebut sebagai subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG).

Anak tersebut dapat dikatakan tidak memiliki permasalahan secara administratif personal. Namun, latar belakang orang tuanya yang mendapatkan status penduduk tetap pada saat menempuh studi di luar negeri dengan dibiayai oleh dana dari negara berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat. Hal ini karena pemberian kewarganegaraan asing tanpa melepaskan kewarganegaraan Indonesia merupakan sebuah hak istimewa atau *privilege* (*privilege*) yang tidak dimiliki oleh banyak orang, terlebih apabila keistimewaan tersebut didapatkan dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh negara Indonesia sendiri.

Paradoks Kebijakan Kewarganegaraan Indonesia

Permasalahan kewarganegaraan di Indonesia sering kali menghadirkan perdebatan di tengah masyarakat karena faktor konstruksi sosial yang mengiringinya. Misalnya, pada pertengahan 2016, terdapat seorang anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) bernama Gloria Natapradja Hamel yang dibatalkan kepesertaannya karena yang bersangkutan terlambat mendaftarkan diri sebagai subjek ABG. Akibatnya, ia dianggap berstatus sebagai WN asing dan berdampak pada pembatalan kepesertaannya sebagai anggota Paskibraka.

Kendala minimnya informasi menjadi alasan keterlambatan pemilihan kewarganegaraan tersebut. Meskipun kemudian hal ini dijadikan perkara gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2017, gugatan tersebut ditolak dan kebijakan kewarganegaraan Indonesia masih berlaku sebagaimana telah

diatur sebelumnya. Pada 2022, pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2022 sebagai respons atas permasalahan yang dialami oleh Gloria dan anak-anak lain yang memiliki kasus yang sama.

Meskipun tujuan diterbitkannya PP Nomor 21 Tahun 2022 adalah untuk mengakomodasi subjek ABG yang belum mendaftarkan diri dan memilih kewarganegaraannya, pemberlakuan masa berlaku hingga 31 Mei 2024 membatasi efektivitas implementasi kebijakan aturan tersebut. Hal ini juga berlaku pada penerapannya terhadap peraturan pendamping, seperti peraturan pelayanan paspor maupun peraturan keimigrasian lainnya.

Dalam sebuah studi kasus yang terjadi di salah satu kantor imigrasi di wilayah Jawa Timur, terdapat seorang anak berinisial AW (21 tahun) yang diketahui memiliki kewarganegaraan ganda karena lahir di Amerika Serikat (AS) meskipun kedua orang tuanya adalah WNI. AW terdeteksi melalui pelaksanaan Operasi Jagrata pada akhir tahun 2023. Ia mengalami kendala dalam upaya pelepasan kewarganegaraan asingnya untuk dapat menjadi WNI sepenuhnya karena pelepasan kewarganegaraan AS dikenakan biaya 3.000 dolar AS (sekitar Rp50.000.000), sementara keluarganya tidak memiliki dana yang cukup pada saat itu. Kondisi tersebut menyebabkan AW terlambat melakukan pemilihan kewarganegaraan.

Kasus yang dialami oleh AW dan anak DS menggambarkan adanya ketimpangan dalam pemberian status kewarganegaraan serta konsekuensi yang dialami. Jika DS membanggakan anaknya yang mendapatkan kewarganegaraan Inggris karena berharap akan memperoleh hak istimewa dari negara tempat ia dan keluarganya tinggal saat ini, AW justru merasakan beban materi dari keputusan yang mungkin tidak ia kehendaki pada saat ia lahir di

negara yang menganut asas *ius soli*.

Kasus AW juga dapat menjadi gambaran paradoks dalam penerapan kebijakan kewarganegaraan di Indonesia. Sepanjang tahun 2025, Imigrasi mencatat adanya 151 orang yang memilih untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Di sisi lain, proses pewarganegaraan Indonesia menunjukkan perkembangan yang makin ketat dari tahun ke tahun. Pada 2020, terdapat 37 permohonan pewarganegaraan dengan 29 permohonan diterima. Adapun pada 2025, terdapat 147 permohonan pewarganegaraan dengan hanya 2 permohonan yang diterima.

Alasan administratif dapat menjadi salah satu faktor utama dalam penurunan persetujuan permohonan

pewarganegaraan, terutama bagi subjek ABG yang masih membutuhkan tahapan pendaftaran diri sebagai subjek ABG sebelum memilih kewarganegaraan Indonesia. Besaran biaya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diterapkan juga dapat memengaruhi kehendak untuk menjadi WNI, mengingat biaya pewarganegaraan bagi subjek ABG dikenakan sebesar Rp5.000.000, sedangkan kehilangan kewarganegaraan atas kehendak sendiri hanya dikenakan biaya Rp500.000.

Meskipun kemudian terdapat 170 subjek ABG yang menerima surat keputusan (SK) untuk menjadi WNI sepanjang tahun 2025, hal ini belum tentu selaras dengan proses menjadi WNI sepenuhnya. Pasalnya, setiap subjek ABG wajib

melepaskan kewarganegaraan asingnya yang tidak menutup kemungkinan akan dikenakan biaya tambahan, seperti yang terjadi pada kasus AW.

Kebijakan Kewarganegaraan dalam Perspektif Keimigrasian

Pengaturan kebijakan kewarganegaraan dalam perspektif keimigrasian diatur dalam beberapa peraturan, seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Dalam pengaturan pada Pasal 2A ayat (3), disebutkan bahwa masa berlaku paspor biasa yang diterbitkan bagi ABG tidak boleh melebihi batas usia anak tersebut untuk menyatakan memilih kewarganegaraannya.

Pembatasan ini bukan sekadar memberikan batasan usia untuk memilih kewarganegaraan, melainkan juga menjadi upaya membangun konstruksi sosial dalam perwujudan asas keadilan bagi setiap warga negara. Hak istimewa dalam kepemilikan kewarganegaraan ganda membutuhkan pembatasan yang formal agar setiap warga negara memiliki kesadaran terhadap tanggung jawab yang dimiliki serta konsekuensi atas pilihan tiap-tiap individu.

Imigrasi memang melaksanakan proses penelaahan status dan kewarganegaraan terhadap 31 permohonan pada Januari 2026 dan sejumlah 28 permohonan pada Februari 2026. Selain itu, Imigrasi menerbitkan visa diaspora, yang dikenal juga sebagai *Global Citizen of Indonesia* (GCI), sebanyak 14 permohonan pada Februari 2026. Namun, hal utama yang perlu diperkuat oleh Imigrasi saat ini adalah upaya pendeteksian dini terhadap subjek ABG agar mereka dapat memahami alur proses administrasi dan konsekuensi yang perlu disiapkan, bahkan sebelum mereka memutuskan menjadi subjek ABG jika memungkinkan.

Peran Imigrasi dalam membangun konsistensi kebijakan juga memerlukan adanya kolaborasi lintas sektoral dengan para pemangku kepentingan yang menangani permasalahan kewarganegaraan di Indonesia. Imigrasi juga perlu melibatkan peran serta masyarakat dalam memberikan pemahaman serta penegasan bahwa kewarganegaraan bukan sekadar permasalahan administratif semata, melainkan juga konsekuensi sosial atas loyalitas dan integritas terhadap bangsa dan negara. ■



Sumber: freepik.com

Geopolitik Dinamis, **IMIGRASI STRATEGIS**

Dunia sedang bergerak cepat, tetapi sayangnya tidak ke arah yang lebih damai. Konflik dan ketidakpastian memaksa jutaan manusia berpindah. Di tengah dinamika yang ada, Imigrasi harus bertransformasi dari fungsi administratif menjadi instrumen strategis negara.

■ Penulis: Rendy Firnanda

Saat ini, dunia sedang tidak baik-baik saja. Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika geopolitik menunjukkan eskalasi yang makin signifikan. Konvergensi antara konflik global di Timur Tengah, perang berkepanjangan Rusia-Ukraina, serta meningkatnya ketegangan diplomatik antara Tiongkok dan Taiwan telah

melahirkan instabilitas kawasan yang kian kompleks. Kondisi tersebut turut memperparah *polikrisis* global yang saling berkaitan—mulai dari sektor energi, perdagangan, hingga mobilitas manusia.

Dalam konteks tersebut, arus migrasi lintas negara tidak lagi sepenuhnya bersifat sukarela, seperti

untuk pariwisata atau bisnis. Sebaliknya, mobilitas manusia kini makin dipengaruhi oleh faktor keterpaksaan—konflik, ancaman keamanan, dan ketidakstabilan di negara asal. Perang di Timur Tengah, misalnya, tidak hanya menghancurkan infrastruktur dan kota, tetapi juga memaksa manusia untuk berpindah secara cepat, dalam jumlah besar, dan sering kali tanpa kepastian.

Orang-orang meninggalkan rumah, pekerjaan, bahkan identitas sosialnya, demi satu tujuan paling mendasar: bertahan hidup. Sebagian mencari perlindungan, sebagian lainnya mencari peluang baru, sementara tidak sedikit yang hanya berharap menemukan tempat yang cukup aman untuk memulai

Seorang wanita menatap kepulan asap dari fasilitas penyimpanan minyak setelah serangan malam sebelumnya oleh pasukan Amerika Serikat dan Israel di Teheran, Iran. (Foto: Arash Khamooshi)



kembali kehidupannya. Rangkaian konflik tersebut menunjukkan satu realitas penting: dunia sedang memasuki era ketidakpastian tinggi (*high uncertainty*).

Di tengah lanskap tersebut, Indonesia hadir sebagai salah satu negara yang menjanjikan keamanan. Konsistensi dalam mengukung politik luar negeri bebas aktif memungkinkan Indonesia tetap luwes dalam merespons dinamika global tanpa kehilangan pijakan kepentingan nasional. Stabilitas politik yang relatif terjaga, disertai dengan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai ruang yang aman, tetapi juga destinasi prioritas bagi banyak warga negara asing (WNA).

Merespons dinamika tersebut, kebijakan keimigrasian tidak lagi dapat bersifat statis dan administratif semata. Imigrasi perlu diposisikan sebagai instrumen strategis negara dalam menghadapi kompleksitas perubahan global. Di sinilah konsep kebijakan selektif (*selective policy*) yang digaungkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menemukan relevansi dan makna sejatinya.

Secara normatif, kebijakan keimigrasian Indonesia yang berlandaskan prinsip kebijakan selektif hanya mengizinkan orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum untuk masuk dan tinggal di wilayah Indonesia. Namun, dalam praktiknya, prinsip ini perlu terus dimaknai ulang agar tetap relevan dengan dinamika global yang cepat berubah.

Dalam konteks geopolitik yang dinamis, kebijakan selektif tidak dapat lagi dipahami sebagai mekanisme penyaringan administratif semata. Ia harus berkembang menjadi instrumen analitis yang mampu membaca konteks secara global, mengidentifikasi pola mobilitas baru, serta memproyeksikan dampaknya bagi kepentingan nasional.

Salah satu manifestasi perubahan tersebut kini terlihat pada meningkatnya kehadiran pekerja jarak jauh (*remote worker*) dan nomad digital (*digital nomad*). Kemajuan teknologi memungkinkan individu bekerja dari mana saja sehingga batas antara tempat tinggal dan tempat bekerja menjadi makin kabur. Dalam situasi geopolitik saat ini, fenomena ini makin relevan—banyak individu memilih berpindah ke negara yang lebih stabil tanpa harus memutuskan hubungan dengan pekerjaannya.

Kehadiran kelompok ini tentu tidak hanya membawa peluang, tetapi juga tantangan. Aktivitas konsumsi, kontribusi pada sektor jasa, hingga penguatan ekosistem ekonomi digital menjadi potensi yang dapat dimanfaatkan. Namun, di sisi lain, tanpa regulasi yang adaptif, fenomena ini juga berisiko menimbulkan berbagai distorsi, mulai dari ketidaksesuaian izin tinggal, implikasi perbedaan sudut pandang dalam perpajakan, hingga potensi ketimpangan sosial di daerah tujuan. Dengan kata lain, manfaat dan risiko hadir secara bersamaan.

Menjawab tantangan tersebut, Ditjen Imigrasi terus bertransformasi menjadi institusi yang adaptif dan responsif. Penguatan pengawasan berlapis, modernisasi sistem berbasis data, serta peningkatan kapasitas analisis risiko menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional di tengah arus mobilitas global yang makin kompleks.

Pendekatan berbasis aturan (*rule-based approach*) kini perlu dilengkapi dengan pendekatan berbasis risiko

(*risk-based approach*). Artinya, keputusan keimigrasian tidak hanya bertumpu pada kelengkapan dokumen, tetapi juga analisis komprehensif terkait latar belakang individu, pola mobilitas, dan konteks geopolitiknya.

Penguatan asesmen risiko (*risk assessment*) menjadi kunci, melalui integrasi data lintas sektor, pemanfaatan teknologi, dan kerja sama internasional. Pada era yang makin terhubung, potensi ancaman kerap tersembunyi dalam pola yang hanya dapat dikenali melalui analisis mendalam.

Pengawasan terhadap orang asing juga harus dilakukan secara berkelanjutan dan adaptif. Pengawasan tidak berhenti pada pintu masuk saja, tetapi mencakup seluruh siklus keberadaan orang asing di wilayah Indonesia. Teknologi digital berperan penting untuk memastikan pengawasan tetap efektif tanpa menghambat mobilitas.

Namun, pendekatan keamanan harus berjalan seiring dengan perspektif Imigrasi sebagai fasilitator pembangunan. Di tengah ketidakpastian global, mobilitas manusia justru dapat menjadi sumber pertumbuhan melalui kontribusi talenta global, investor, dan pelaku ekonomi digital. Oleh karena itu, tantangan utama bukan terletak pada memilih antara keterbukaan dan pembatasan belaka, melainkan pada bagaimana merancang keterbukaan yang dikelola secara optimal.

Dalam konteks ini, Imigrasi Indonesia dituntut untuk mampu menjaga keseimbangan antara aspek keamanan dan kemanfaatan ekonomi. Peran tersebut menjadi penting, mengingat Imigrasi tidak hanya hadir sebagai regulator yang mengendalikan arus masuk orang asing, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional—sejalan dengan semangat “Imigrasi untuk Rakyat”.

Pada akhirnya, dinamika geopolitik yang terus bergerak menuntut respons yang adaptif dan strategis. Imigrasi tidak lagi dapat diposisikan sebagai fungsi administratif semata, tetapi juga instrumen strategis negara dalam mengelola arus manusia global. Dalam dunia yang ditandai oleh konflik, ketidakpastian, dan transformasi digital, kemampuan untuk membaca arah mobilitas manusia menjadi keunggulan tersendiri.

Di titik inilah, kebijakan selektif bukan sekadar prinsip, melainkan fondasi utama dalam menjaga kedaulatan dan mengarahkan masa depan bangsa. ■





Seorang ayah mengarahkan anaknya dalam bermain gawai. (Foto: Pavel Danilyuk)

Membesarkan Anak di Desa Global: **ANTARA PELUANG DAN JERAT DIGITAL**

Di balik kemudahan akses informasi, anak-anak menghadapi risiko digital laten yang makin kompleks. Tanpa pendampingan yang tepat, desa global bisa berubah menjadi rimba yang berbahaya.

■ Penulis: Elyan Nadian Zahara

Adagium klasik *"It takes a village to raise a child"* sering dikutip sebagai pengingat bahwa membesarkan anak bukanlah perkara mudah. Tugas ini tidak cukup hanya dijalankan oleh orang tua, tetapi juga membutuhkan peran serta orang-

orang "sekampung". Dahulu, makna "desa" dalam pepatah tersebut bersifat sangat fisik dan teritorial—sebuah ekosistem yang terdiri atas orang tua, guru, tetangga, hingga perangkat desa yang saling menjaga anak-anak di dalamnya.

Kini, pagar-pagar itu meluas, tidak lagi sebatas fisik. Penetrasi teknologi membuat anak-anak tumbuh dalam sebuah *"global village"*—desa global tanpa batas geografis. Di desa ini, pengaruh seorang pembuat konten dari belahan dunia lain bisa jauh lebih kuat daripada teguran guru di ruang kelas atau petuah tetua. Pesan-pesan masuk secara eksplisit maupun implisit, sukarela masuk hingga ke alam bawah sadar.

Rentan di Tengah Limpahan Informasi

Dalam perspektif teori ekologi media, teknologi bukan menjadi sekadar alat, melainkan memiliki kemampuan membentuk cara manusia berpikir dan berinteraksi. Desa global saat ini dihuni oleh algoritma yang bekerja berdasarkan logika komersial, bukan



logika pedagogis. Karakteristik generasi Z dan alfa yang bersifat *digital native* membuat mereka memiliki akses tak terbatas terhadap informasi. Namun, pada saat yang sama, mereka juga berada dalam posisi yang sangat rentan.

Ancaman seperti perundungan siber (*cyberbullying*), pelecehan seksual siber (*cyber grooming*), hingga eksploitasi data pribadi menjadi risiko sehari-hari. Berbeda dengan ancaman di dunia nyata yang sering kali tampak secara fisik, ancaman digital bersifat laten. Seorang predator tidak perlu lagi

mendekati anak di taman bermain; mereka cukup masuk melalui fitur pesan langsung (*direct message*) di gim dalam jaringan (*daring*) atau aplikasi media sosial, lalu membangun kepercayaan melalui manipulasi psikologis yang halus.

Ini kemudian menjadi tantangan terbesar orang tua: Bagaimana menjaga anak di sebuah “desa” yang pintunya terbuka 24 jam bagi siapa saja dari seluruh dunia?

Paradoks Otonomi Digital

Meskipun penuh dengan bahaya, desa digital ini juga menyimpan peluang. Terdapat peluang intelektual yang luar biasa di baliknya, terlebih karena anak-anak masa kini memiliki kemampuan navigasi informasi yang jauh melampaui generasi sebelumnya. Dengan demikian, di desa ini mereka dapat belajar tentang keberagaman, sains populer, hingga keterampilan teknis secara mandiri. Kendati begitu, di sini jugalah letak paradoksnya: Makin tinggi otonomi digital seorang anak, makin besar pula celah kerentanannya jika tidak dibarengi dengan literasi yang proporsional.

Masalah utama muncul ketika terjadi ketimpangan antara kemajuan teknologi dan kesiapan mental pengguna. Paparan konten yang tidak sesuai usia—mulai dari sadisme, LGBT, hingga pornografi—menjadi ancaman serius. Tanpa rambu-rambu dan kepedulian ‘penduduk desa’, desa global berubah menjadi rimba siber yang penuh ranjau bagi anak-anak yang masih hijau.

Regulasi Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026

Di Indonesia, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permenkomdigi) Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pedoman Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE). Negara menuntut sektor swasta (penyelenggara sistem elektronik) untuk tidak lepas tangan atas dampak sosial yang mungkin mereka timbulkan.

Kewajiban menyediakan fitur verifikasi usia yang ketat, enkripsi data anak yang lebih kuat, serta mekanisme pelaporan yang instan dan

responsif merupakan bentuk rambu-rambu di desa global. Pemerintah Indonesia, melalui aturan ini, berupaya mengembalikan fungsi pengawasan kolektif dengan memaksa korporasi teknologi untuk terlibat dalam memberikan batasan bagi penduduk desa yang masih berusia minor.

Literasi Digital dan Pendampingan Dialogis

Kendati demikian, riset komunikasi selalu menunjukkan bahwa hukum hanyalah instrumen di sisi hilir. Hulu dari perlindungan anak tetaplah berada pada unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Sebagai orang dewasa—baik orang tua, pendidik, maupun sesama penduduk desa global—kita tidak bisa lagi hanya bertindak sebagai pengawas yang represif. Mematikan sambungan internet atau menyita gawai bukan lagi solusi yang efektif pada era yang serba terhubung ini.

Pendekatan yang harus diambil adalah pendampingan yang bersifat dialogis. Artinya, orang dewasa harus mampu masuk ke dalam ruang digital anak tanpa menjadi ancaman bagi privasi mereka. Kita perlu membangun “vaksin” dalam diri anak melalui literasi digital yang kritis. Anak harus diajarkan bahwa jejak digital bersifat abadi dan validasi dari orang asing di kolom komentar tidak lebih berharga daripada integritas diri di dunia nyata. Pendekatan dialogis dan literasi kritis inilah yang tidak bisa dilakukan sendiri oleh keluarga.

Seperti adagium yang dikutip sebelumnya, perlindungan anak di dunia digital adalah sebuah proyek kolektif yang dibangun atas dasar kepedulian untuk masa depan anak bangsa yang lebih baik. Pemerintah menyediakan payung hukum; platform menyediakan infrastruktur yang aman; dan masyarakat menyediakan bimbingan moral serta edukasi. Ketiganya harus bergerak secara simultan untuk memastikan bahwa desa global tidak melahirkan generasi yang sakit, melainkan generasi yang tangguh dan bijak dalam mengelola teknologi.

Dengan cara inilah, semangat “*It takes a village to raise a child*” dapat kembali hidup di layar-layar ponsel kita. Kita tidak ingin anak-anak kita sekadar selamat dari ancaman siber; kita ingin mereka menjadi warga digital yang berdaulat dan mampu menggunakan teknologi untuk kemajuan peradaban, bukan menjadi korban dari kemajuan itu sendiri. ■

PENETRASI TEKNOLOGI MEMBUAT ANAK-ANAK TUMBUH DALAM SEBUAH “GLOBAL VILLAGE”—DESA GLOBAL TANPA BATAS GEOGRAFIS.

Sinyal Lelah di Balik Layar:

KELOLA KESEHATAN MENTAL SAAT KERJA DARI RUMAH

Drink plenty of water

Don't travel

Health care

Eating hot cooked food

Sumber: freepik.com

Efektif per April 2026, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan kerja dari rumah satu hari dalam sepekan bagi ASN. Namun, tanpa batasan yang jelas, fleksibilitas ini dapat meningkatkan risiko kelelahan mental.

■ Penulis: Amelia Choirun Nisa (psikolog klinis RS Paru Manguharjo Jawa Timur)

Seringkah Anda merasa tidak bersemangat, kehabisan tenaga, atau bahkan mengalami penurunan produktivitas? Atau mungkin Anda juga merasakan perasaan frustrasi, sinisme terhadap rekan kerja, atau keinginan untuk mengisolasi diri? Padahal, dulu Anda mampu berprestasi dengan mudah. Kondisi ini kerap memicu pertanyaan batin, *"Apakah aku sudah tidak mampu lagi? Mengapa segalanya terasa begitu sulit?"*

Jika pernah merasakan hal di atas, Anda mungkin mengalami apa yang disebut dengan kelelahan mental atau *burnout*. Kondisi ini lebih dari sekadar lelah secara fisik. Kelelahan mental adalah bentuk hilangnya koneksi—baik terhadap pekerjaan, atasan, rekan kerja, maupun diri sendiri. Fenomena ini menjadi makin nyata pada era kerja dari rumah (KDR atau *work from home*/WFH), ketika batasan antara ruang kerja dan kehidupan pribadi mulai kabur.

Akibat Kaburnya Batas

Efektif per April 2026, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan KDR satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN). Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas serta efisiensi anggaran dan energi melalui layanan digital, fleksibilitas yang ditawarkan sering kali menyimpan beban tanggung jawab yang jauh lebih besar.

Ketika fleksibilitas ini tidak dikelola dengan batasan yang jelas, risiko kelelahan mental pun meningkat. World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa kelelahan mental adalah sindrom akibat stres kerja kronis yang tidak berhasil dikelola, yang ditandai dengan kelelahan, penurunan efikasi diri, serta munculnya perasaan sinis terhadap pekerjaan. Kelelahan mental bukanlah diagnosis medis, melainkan fenomena yang berkaitan dengan konteks kerja dan sangat mungkin dialami oleh siapa pun.

Kelelahan mental akibat bekerja sering kali dimaknai sebagai dampak dari beban kerja yang tidak ada hentinya. Namun, kita kerap lupa bahwa kelelahan tersebut juga dapat berasal dari ketidakmampuan dalam mengelola stres yang muncul akibat berbagai tekanan sepanjang hari, kaburnya batas antara kehidupan profesional dan personal, atau bahkan tidak adanya ruang aman untuk menyalurkan kelelahan emosional. Hal ini akan memicu lonjakan stres.

Dalam situasi tanpa batas yang jelas tersebut, paparan kortisol atau hormon stres memunculkan respons *fight or flight* (melawan atau kabur). Respons ini sebenarnya dirancang untuk situasi jangka pendek, bukan untuk kondisi yang berlangsung terus-menerus. Peningkatan kadar kortisol secara berkepanjangan inilah yang menyebabkan kelelahan serta secara signifikan menghambat kemampuan otak untuk memulihkan diri dan mengatur suasana hati.

Menavigasi Emosi

Untuk menghadapi tantangan ini, kemampuan *self-directed learning* atau pengembangan diri mandiri menjadi sangat relevan. Pendekatan ini melibatkan dua komponen utama: kesadaran diri dalam memahami kapasitas serta kebutuhan individu dan refleksi diri agar kita dapat mengarahkan perkembangan ke arah yang tepat. Dengan menata ulang cara kerja, kita tidak sekadar "bertahan" menghadapi laju zaman, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan hidup.

Penting untuk dipahami bahwa kelelahan mental bukan sekadar masalah pribadi, melainkan isu yang juga berkaitan pada lingkungan kerja dan budaya organisasi. Sering kali, individu takut dianggap tidak kompeten sehingga memilih menyembunyikan kelelahannya. Di sinilah konsep *psychological safety* atau keamanan psikologis menjadi krusial. Organisasi perlu menciptakan ruang

aman agar karyawan merasa nyaman mendiskusikan kondisi mentalnya tanpa rasa takut.

Tip agar Tetap Sehat Mental

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan secara praktis untuk menjaga kondisi mental selama KDR, seperti berikut ini.

1. Kenali tanda-tanda *burnout* atau kelelahan mental. Luangkan waktu untuk lebih menyadari dan mengakui perasaan kelelahan yang dialami.
2. Bangun ulang batasan. Batasan sering kali kabur karena kita kerap tidak memberi jeda transisi antara sebelum dan sesudah bekerja.
3. Buat tiga prioritas utama dalam pekerjaan harian. Menentukan bobot dalam pekerjaan akan membantu kita bekerja secara maksimal.
4. Kelola energi. Banyak yang mengira bahwa kunci produktivitas sering kali adalah mengatur waktu dengan baik. Padahal, yang lebih menentukan adalah mengelola energi. Hadir dalam satu hal dalam satu waktu memberi ruang bagi otak untuk beristirahat dari rasa siaga yang terus menerus.
5. Ciptakan *psychological safety*. Keterbukaan yang dilakukan pimpinan dapat menciptakan efek domino dalam tim sehingga anggota tim akan merasa lebih aman ketika mengalami kesulitan. Mereka dapat bertanya tanpa rasa takut dan tetap merasa kompeten.
6. Pertimbangkan bantuan profesional. Jika kelelahan mental sudah tidak dapat dibendung lagi dan pikiran sulit dikendalikan, mencari pertolongan profesional menjadi salah satu cara kita dalam bertanggung jawab terhadap diri sendiri.

KDR bukanlah masalah. Kelelahan mental juga bukan ancaman, melainkan sebuah sinyal bahwa mungkin ada hal yang perlu diselaraskan dengan kapasitas kita. Dengan memilih untuk lebih hadir dalam pekerjaan, menata ulang batasan, menentukan prioritas, serta menjadikan fleksibilitas sebagai kekuatan, kita belajar menjadi lebih jujur dan lebih banyak mendengarkan diri sendiri. ■

KELELAHAN MENTAL JUGA BUKAN ANCAMAN, MELAINKAN SEBUAH SINYAL BAHWA MUNGKIN ADA HAL YANG PERLU DISELARASKAN DENGAN KAPASITAS KITA.

Kembali ke Akar: MEMBANGUN KEDAULATAN HIDUP DI TENGAH KETIDAKPASTIAN GLOBAL

Perubahan global yang makin kompleks dan cepat mendorong manusia untuk mencari cara baru untuk bertahan. Salah satu respons yang kini menguat adalah upaya “kembali ke akar” sebagai bentuk kemandirian hidup.

■ Penulis: Roro Aditya C.N.

Dunia tengah berubah dengan kecepatan yang mendebarkan sekaligus mencemaskan. Krisis iklim adalah prediksi ilmiah yang menjadi nyata. Ia menyapa lewat cuaca ekstrem, pergeseran musim yang tidak menentu, hingga ketidakpastian panen global. Di sisi lain, bayang-bayang krisis energi dan guncangan rantai pasokan akibat disrupsi geopolitik memaksa manusia untuk menata ulang fondasi cara bertahan hidup. Di tengah hiruk pikuk modernitas yang serbainstan dan rapuh, sebuah gerakan sunyi tetapi kuat mulai merebak: sebuah pilihan untuk “kembali ke akar”.

Kembali ke akar bukanlah tren musiman. Kini, ia telah menjadi sebuah manifestasi ketahanan mandiri—sebuah respons terhadap kerapuhan sistem global yang selama ini kita anggap mapan. Ini menjadi perjalanan untuk menanggalkan hal-hal artifisial dan mendefinisikan ulang kesejahteraan melalui kesederhanaan organik. Ketika harga pangan melonjak dan limbah plastik menggunung, tangan-tangan yang kembali terampil mengolah tanah dan menghargai siklus hidup akan menjadi yang bertahan dalam keberlanjutan masa depan.

Kemandirian yang Membumi

Banyak yang beranggapan bahwa untuk hidup mandiri dan berkelanjutan, seseorang membutuhkan lahan luas di pedesaan yang terpencil. Namun, anggapan tersebut dipatahkan oleh realitas di kota-kota besar. Kembali ke akar bukan berarti memutus hubungan sosial atau mengisolasi diri dari peradaban, melainkan mengupayakan

kesadaran untuk membangun kembali kedaulatan hidup melalui pemulihan kemampuan dasar manusia yang sempat tergerus oleh ketergantungan pada industri.

Proses ini dimulai dengan memahami kembali “bahasa” lingkungan sekitar. Manusia modern sering kali lebih mengenal merek produk di supermarket daripada jenis tanaman pangan lokal yang tumbuh di sekitarnya. Dengan kembali ke akar, kita belajar mengidentifikasi potensi alam, mulai dari menanam sayuran di balkon hingga mengelola limbah domestik secara mandiri melalui sistem permakultur.

Ada kepuasan batin yang terasa saat seseorang beralih dari budaya instan menuju praktik *slow living*. Di sini, kebutuhan harian, seperti sabun nabati atau pembersih rumah tangga alami, merupakan buah karya tangan sendiri. Aspek ini juga mencakup rehabilitasi tubuh secara alami. Fokus kesehatan bergeser dari sekadar mengobati gejala menjadi langkah pencegahan melalui gaya hidup seimbang dan pemanfaatan “apotek hidup”, seperti jahe, kunyit, dan temulawak yang tersedia langsung dari alam.

Cerita Hijau dari Balkon Apartemen

Rian (32), seorang desainer grafis yang bekerja di sebuah perusahaan teknologi di Jakarta, setiap pagi selalu meluangkan waktu 30 menit di balkon apartemennya yang berukuran 3x2 meter. Balkon kecil itu ia fungsikan sebagai sebuah ekosistem mini yang produktif.

“Awalnya saya hanya ingin menanam cabai karena harga di pasar sering naik turun. Tapi ternyata, merawat tanaman

memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang,” ujar Rian. Ia menata rak vertikal berisi kangkung, pakcoi, dan tomat ceri. Di sudut lain, sebuah wadah kompos berventilasi mengolah sisa kulit buah dan sayur dari dapurnya menjadi pupuk cair organik.

Rian bahkan melangkah lebih jauh dengan memelihara dua kotak akuaponik sederhana. Di dalamnya, ikan nila menyediakan nutrisi untuk tanaman melalui kotoran, sementara tanaman bertugas menjernihkan air untuk ikan. “Ini menjadi *me time* sekaligus ‘dapur hidup’ saya,” ucapnya.

Ketika disrupsi global membuat harga sayur organik melonjak, Rian



justru memetikanya sendiri tepat di depan kamar tidur. Baginya, *urban farming* adalah hobi sekaligus strategi resiliensi menghadapi dunia yang tidak menentu.

Ilmu Bertahan Hidup di Dunia Modern

Tren yang dijalani oleh orang-orang seperti Rian adalah bagian dari keinginan manusia untuk memiliki kembali kendali atas kebutuhan dasarnya. *Sustainable living* atau gaya hidup berkelanjutan hari ini adalah membangun sistem yang tidak bergantung sepenuhnya pada pasar global yang rentan, bukan sekadar tentang menahan diri dari sifat konsumtif.

Ilmu bertahan hidup—mulai dari cara menyimpan benih secara tradisional, memanen air hujan, hingga memahami nutrisi tanaman lokal—kini dipelajari kembali dengan penuh antusiasme oleh generasi muda. Mereka mulai menyadari bahwa ketergantungan penuh pada rantai pasok yang panjang adalah titik terlemah manusia modern. Dengan bertanam, kita memangkas jejak karbon dari transportasi logistik

ribuan kilometer. Dengan belajar mengolah pangan sendiri, kita menjaga kesehatan tubuh dari bahan kimia sintetis yang kerap bersembunyi di balik label “praktis”.

Krisis dan Peluang Menuju Perubahan

Mengapa semua ini menjadi krusial sekarang? Kita hidup pada era saat ketidakteraturan adalah hal yang normal. Perubahan iklim mengancam kestabilan iklim mikro yang dibutuhkan pertanian skala besar. Jika terus mengandalkan sistem pangan terpusat yang rapuh, kita akan selalu menjadi pihak yang paling terdampak saat krisis energi atau gangguan distribusi terjadi.

Gaya hidup berkelanjutan adalah bentuk perlawanan yang elegan terhadap konsumerisme berlebihan. Saat mulai menanam, kita belajar menghargai proses yang tidak bisa dipercepat oleh algoritma. Saat mulai mengompos, kita memahami hukum siklus purba—apa yang kita berikan pada Bumi akan kembali dalam bentuk nutrisi yang menghidupkan.

Tentu, transisi ini tidak harus dilakukan secara dramatis atau ekstrem.

Anda tidak perlu langsung mengundurkan diri dari pekerjaan, pindah ke hutan, atau mengubah rumah menjadi peternakan mandiri dalam semalam. Keberlanjutan adalah tentang langkah-langkah kecil yang konsisten.

Mulailah dari memelihara satu pot tanaman herbal di ambang jendela, memilah sampah dapur untuk dijadikan kompos, atau menanam satu benih sayuran yang paling sering Anda konsumsi. Setiap benih yang tumbuh adalah merupakan satu langkah menuju kemandirian.

Di dunia yang bergerak terlalu cepat dan sering tidak masuk akal, kembali ke akar adalah cara untuk tetap waras dan berdaya. Ini adalah investasi waktu yang akan menghasilkan keuntungan berupa kesehatan fisik, kedamaian mental, dan ketangguhan pada masa depan yang penuh tanda tanya. Hidup selaras dengan apa yang diberikan alam bukan lagi sekadar pilihan gaya hidup alternatif, melainkan jalan untuk menemukan kembali keseimbangan di tengah dunia yang makin kompleks. Siap untuk memulai petualangan hijau Anda sendiri? ■



Seorang pria menyiram tanaman di kebun vertikal di Cikini, Jakarta Pusat (ilustrasi). (Foto: Dok. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta)

Para Kartini Imigrasi: WUJUDKAN MIMPI, JAGA PINTU GERBANG NEGARA

Bagi mereka, menjadi Kartini masa kini bisa dengan seragam insan Imigrasi. Mereka menjelajah dunia digital, memperbarui stigma, dan menjaga pintu gerbang negara sambil tetap menjalankan peran sebagai anak, istri, dan ibu.



Andina Ramadhani Salsabila
(Kantor Imigrasi Baubau)

Aku anak tunggal perempuan yang tumbuh dengan semangat mandiri dan rasa ingin tahu yang besar. Sejak sekolah, aku aktif sebagai duta pariwisata kota dan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), yang membentuk kedisiplinan serta rasa percaya diriku. Kecintaanku pada perjalanan membawaku mengunjungi berbagai tempat, hingga akhirnya pengalaman umrah ke luar negeri menjadi titik awal ketertarikanku pada dunia keimigrasian.

Tahun lalu, aku lolos sebagai pegawai negeri sipil (PNS) Imigrasi dan ditempatkan di seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim). Pengalaman yang paling berkesan adalah saat kami berhasil mengamankan 40 warga negara asing (WNA) ilegal dan memulangkan mereka ke negara asal. Kini, aku berusaha menjadi Kartini Imigrasi yang berkontribusi dan menginspirasi.

“

Selvira Dwita
(Kantor Imigrasi Pekanbaru)

Vira, seorang petugas imigrasi, menahan rindu pada orang tua di kampung. Pagi itu, di bandara, rutinitasnya terusik oleh seorang gadis muda yang tampak gelisah. Tujuannya Kamboja, tetapi ia hanya membawa tas usang, tanpa tiket pulang, tanpa bukti penginapan. Suaranya bergetar saat mengaku dijanjikan pekerjaan bergaji besar oleh kenalan di Facebook.

Hati Vira mencelus. Ia paham, ini jebakan. Dengan sigap, ia memanggil petugas dan menghentikan keberangkatan gadis itu. Saat semuanya usai, Vira tersenyum tipis. Ia sadar, Kartini masa kini tak selalu menulis. Kadang, ia berjaga di balik loket, melindungi sesama.



Desty Ramadani (Kantor Imigrasi Entikong)

Sebagai perempuan yang bekerja di bidang keimigrasian, saya belajar bahwa menjadi Kartini Imigrasi bukan hanya tentang emansipasi, melainkan juga dedikasi dan tanggung jawab dalam bertugas. Sebagai bagian dari *sandwich generation* yang tumbuh bersama ibu tunggal, saya terus berupaya berkiprah dan memberi yang terbaik bagi keluarga. Di luar pekerjaan, saya tetap menjalankan peran sebagai anak sekaligus mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, serta berkolaborasi sebagai penulis buku akademik.

Perjuangan R.A. Kartini menginspirasi saya bahwa pendidikan perempuan penting untuk mendorong perubahan. Bagi saya, menjadi Kartini Imigrasi berarti mampu berdiri kuat; menjaga keseimbangan antara karier, keluarga, dan pendidikan; serta memperjuangkan kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan.

”





Uray Vhira Aprilia
(Kantor Imigrasi Entikong)

Sebagai petugas imigrasi, aku pernah menemui seorang perempuan dengan dokumen yang belum lengkap. Tangannya menggenggam map lusuh, matanya cemas, seolah mimpinya hampir luruh. Aku tidak serta-merta menolak. Dengan bahasa sederhana, aku menjelaskan apa yang kurang. Ia mengangguk pelan. Harapan itu belum padam.

Melihatnya, aku teringat: Perempuan selalu punya cara untuk bertahan. Di meja kecil itu, aku belajar. Tegas tak harus keras; aturan tak harus mematahkan. Aku mungkin bukan Kartini, tetapi dalam menjaga langkah perempuan lain, aku percaya semangat itu masih berjalan, pelan, tetapi tak pernah benar-benar padam.

“

Resty Andini
(Kantor Imigrasi Pekanbaru)

“Kartini masa kini” mungkin terdengar sedikit mengarah ke retorika, jika kita hanya memandangnya dari pengertian emansipasi belaka. Padahal, Kartini bukanlah sekadar mengenang nama dan puisi atau lagu yang bersyair tentang wanita.

Kartini modern tidak harus mengenakan kebaya dan batik saja. Aku, Kartini masa kini, mengenakan seragam kebanggaanku: seragam aparat sipil negara (ASN) Imigrasi. Kami menjelajah dunia digital, memperbarui stigma dan doktrin yang memandang wanita tidak akan bisa setara dengan pria, serta memilih menjalani peran sebagai penjaga pintu gerbang negara.

“Kartini masa kini” tidak sekadar tentang posisi, tetapi lebih pada perjuangan, ide dan gagasan, keberanian mengambil keputusan, serta kontribusi nyata kepada Indonesia.



Lili Handayani
(Kantor Imigrasi Palu)

Peran sebagai PNS sekaligus ibu dari seorang anak yang baru saja genap berusia

satu tahun membuat saya menyadari bahwa perjuangan tidak selalu harus bersuara lantang di panggung besar atau berdiri tegap di barisan terdepan. Di bagian yang kerap luput dari sorotan, justru tersimpan perjuangan yang tidak hanya menguras tenaga, tetapi juga hati dan emosi.

Di samping melaksanakan tanggung jawab sebagai abdi negara, bagi saya menjaga, merawat, dan membesarkan seorang anak adalah amanah yang luar biasa besar. Jika dahulu Kartini memperjuangkan ruang bagi perempuan untuk belajar dan berkembang, hari ini saya berjuang membesarkan seorang anak laki-laki agar kelak tumbuh menjadi pribadi yang hebat, bermanfaat, dan membanggakan bagi bangsa dan negara.

”



Maysari Rahmawati
(Kantor Imigrasi Cilegon)

Lahir pada 2005, aku seorang wanita dengan mimpi sederhana yang percaya bahwa meskipun perjalanan tidak selalu mulus, jalan menuju kesuksesan akan selalu terbuka. Lima tahun terakhir menjadi awal cerah bagiku, dimulai pada 2021, saat peran sebagai duta membuka duniaku. Setelah lulus SMA, aku menjadi penulis wara (*copywriter*) magang di kantor pemberitaan. Di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), aku diberi kesempatan berharga untuk magang serta memperjuangkan hak perempuan dan anak.

Kini, sebagai petugas imigrasi, aku makin menyadari bahwa setiap wanita berhak untuk berada di tempat yang mereka impikan. Aku meyakini segala pencapaian ini adalah buah manis dari doa Ibu yang tak pernah putus mengiringi setiap langkahku.

Imigrasi Indonesia **Autogate**

Apa itu **autogate**?

Sistem pemeriksaan keimigrasian otomatis di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) yang memungkinkan penumpang menjalani pemeriksaan imigrasi secara mandiri tanpa perlu antri di konter petugas



Autogate telah diterapkan di **pelabuhan internasional Batam** dan **bandara internasional**, antara lain:

Siapa saja yang bisa melewati **autogate**?



Warga negara Indonesia (WNI)
pemegang paspor Indonesia, baik paspor elektronik maupun nonelektronik



Warga negara asing (WNA)
pemegang e-paspor negara Bebas Visa Kunjungan, telah mengajukan e-Visa, dan mengisi All Indonesia



Anak berusia 6 tahun ke atas

Soekarno-Hatta, Jakarta

I Gusti Ngurah Rai, Bali

Juanda, Surabaya

Kualanamu, Medan

Minangkabau, Padang 

Yogyakarta 

Sultan Hasanuddin, Makassar 

Sam Ratulangi, Manado 



Langkah Mudah Menggunakan Autogate

Hal yang perlu disiapkan untuk melewati *autogate*!



Paspor masih berlaku **minimal 6 bulan**

All
Indonesia

Mengisi **All Indonesia** (H-3 sebelum kedatangan) melalui allindonesia.imigrasi.go.id atau aplikasi All Indonesia



Simpan **salinan digital** dokumen penting

e-VISA
ELECTRONIC VISA REPUBLIC OF INDONESIA

Bagi WNA lakukan **pengajuan visa** secara daring melalui evisa.imigrasi.go.id



Berdirilah di belakang garis antrian dan **mohon antre** dengan tertib.

1



Harap **melepas topi, kacamata, dan masker** saat menggunakan *autogate*.

2



Silakan masuk ke *autogate* berwarna hijau. Setiap *autogate* hanya dapat digunakan oleh satu orang.

3



Berdirilah tepat di atas tanda kaki berwarna kuning.

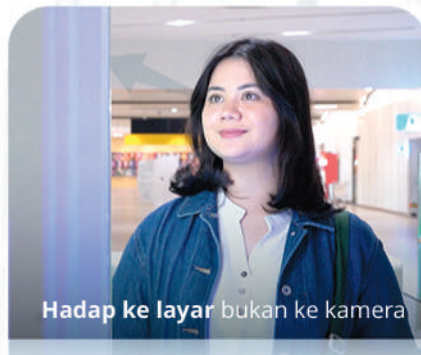
4



Pastikan **melepas sampul paspor**

Buka **halaman biodata** pada paspor dan **letakkan di area pemindaian (scan)**.

5



Hadap ke **layar** bukan ke kamera

Silakan tunggu proses pemeriksaan keimigrasian. Setelah pemeriksaan berhasil, **pintu *autogate* akan terbuka dan dapat dilalui**.

6

Utamakan Keselamatan Tamu Allah: **KJRI JEDDAH SIAPKAN STRATEGI PERLINDUNGAN WNI**

Meski eskalasi konflik di Timur Tengah meningkat, situasi di Makkah dan Madinah tetap stabil dan kondusif. KJRI Jeddah pun telah menyiapkan rencana darurat dan berbagai kemudahan administratif untuk menjamin perlindungan menyeluruh bagi jemaah Indonesia.

■ Penulis: Yolanda Rosylvia Juniar

Eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran yang memasuki fase konfrontasi terbuka pada awal 2026 mulai memberikan dampak terhadap dinamika geopolitik di kawasan Teluk. Serangan *drone* dan rudal yang menyasar sejumlah instalasi energi serta pangkalan militer di wilayah timur Arab Saudi sempat memicu alarm kewaspadaan global. Namun, di tengah konflik yang memanas, aktivitas ibadah di dua kota suci, Makkah dan Madinah, dilaporkan tetap stabil dan kondusif bagi jutaan jemaah dari seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Hingga pertengahan April 2026, wilayah Hijaz yang mencakup Makkah dan Madinah tetap menjadi zona dengan prioritas keamanan tertinggi. Otoritas Arab Saudi telah memperkuat sistem pertahanan udara di titik-titik strategis untuk mencegah potensi gangguan lintas batas. Meski stabilitas domestik di wilayah spiritual umat Islam ini terjaga, dampak tidak langsung mulai dirasakan secara signifikan pada sektor transportasi udara. Banyak maskapai internasional terpaksa melakukan perubahan rute (*rerouting*) dan mengalami penundaan jadwal berkepanjangan demi menghindari zona udara yang berisiko tinggi.

Menanggapi situasi yang terus berkembang, Staf Teknis Imigrasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah Okky Aditya Yaqsa menegaskan bahwa perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) dan jemaah umrah di lapangan menjadi prioritas utama.

"Fokus target konflik sejauh ini bukan wilayah religius, melainkan pangka-

lan militer dan fasilitas energi di wilayah-wilayah strategis tertentu. Hingga saat ini, tidak ada indikasi Makkah dan Madinah menjadi target langsung. Meski begitu, kami telah mengaktifkan rencana kontingensi (*contingency plan*) yang berfokus pada pencegahan, respons cepat, dan skenario evakuasi terukur jika situasi memburuk," ujar Okky.

Skenario Darurat dan Perlindungan WNI

Langkah darurat yang disiapkan oleh Imigrasi untuk perlindungan WNI mencakup pembaruan data secara waktu nyata (*real-time*). Di tengah situasi krisis, akurasi data menjadi sangat penting. KJRI Jeddah mengandalkan sistem pelaporan mandiri dan koordinasi intensif dengan para agen perjalanan untuk memastikan setiap jemaah dapat dilacak keberadaannya jika situasi berubah secara drastis dalam waktu singkat.

Skenario evakuasi juga telah ditetapkan secara mendetail. KJRI telah menyiapkan sejumlah titik kumpul (*assembly point*) dan *shelter* sementara yang dianggap aman dari jangkauan konflik utama. Okky menjelaskan bahwa jika evakuasi terpaksa dilakukan, prosesnya akan dilaksanakan secara bertahap dengan memprioritaskan kelompok rentan, seperti jemaah lansia, anak-anak, serta mereka yang memiliki kondisi kesehatan khusus.

Selain pengamanan fisik, kesiapan dokumen menjadi pilar penting. Dalam situasi kacau, kehilangan paspor adalah risiko yang sering terjadi. Untuk itu, Teknis Imigrasi telah menyiapkan blangko Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) dalam jumlah yang memadai.

Diskresi dari Otoritas Arab Saudi

Salah satu kekhawatiran terbesar jemaah saat ini adalah ancaman tinggal lajak (*overstay*) akibat pembatalan penerbangan secara mendadak. Menutup ruang udara adalah kebijakan standar dalam konflik militer terbuka, tetapi bagi jemaah umrah, hal ini bisa berarti tertahan di negara orang melebihi masa berlaku visa mereka.

Untuk mengantisipasi hal itu, pemerintah Arab Saudi mengimplementasikan sejumlah diskresi. Warga negara asing (WNA), termasuk jemaah Indonesia yang visanya habis pada periode krisis (sejak akhir Februari 2026), diberikan relaksasi untuk meninggalkan wilayah Saudi hingga 18 April 2026 tanpa dikenakan denda atau sanksi hukum apa pun.

"Ini adalah bentuk perlindungan kemanusiaan yang sangat kami apresiasi dari otoritas Saudi. Mereka memahami bahwa situasi ini adalah keadaan kahar (*force majeure*)," tambah Okky. Selain itu, terdapat mekanisme visa masuk darurat bagi mereka yang harus menempuh jalur darat menuju negara tetangga untuk mencari penerbangan alternatif kembali ke tanah air.

Sinergi Informasi Satu Pintu

Untuk mencegah kepanikan, KJRI Jeddah menerapkan strategi komunikasi satu pintu. Staf teknis Imigrasi bersinergi dengan staf teknis Urusan Haji dan Umrah (UHU) untuk melakukan penyesuaian pesan (*message alignment*). Setiap informasi mengenai rute penerbangan, kebijakan visa terbaru, hingga perkembangan keamanan militer diverifikasi secara berlapis sebelum disebarkan kepada ketua rombongan dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Optimalisasi komunikasi ini juga mencakup layanan saluran siaga (*hot-line*) yang beroperasi penuh selama 24 jam. Petugas siaga diinstruksikan untuk tidak hanya memberikan bantuan administratif, tetapi juga dukungan informa-

tif yang menenangkan bagi jemaah yang merasa cemas.

Okky juga menitipkan pesan kepada para pemilik agen perjalanan umrah. "Dalam kondisi saat ini yang belum sepenuhnya stabil, prioritas utama adalah keselamatan. Jangan sampai PPIU memaksakan rute penerbangan yang melintasi zona konflik hanya demi efisiensi biaya," imbuhnya.

Imbauan bagi Calon Jemaah

Bagi masyarakat di Indonesia yang sudah menjadwalkan keberangkatan dalam waktu dekat, situasi ini memang memerlukan kebijaksanaan. Pemerintah mengimbau calon jemaah untuk tetap

tenang sembari terus memperbarui informasi seputar situasi di Timur Tengah. Memilih PPIU yang kredibel menjadi langkah awal paling menentukan. Agen perjalanan yang memiliki rencana kontingensi—seperti kesiapan akomodasi tambahan jika pesawat tertunda—akan sangat membantu jemaah dalam menghadapi ketidakpastian. Calon jemaah juga diingatkan untuk selalu menyimpan salinan digital dari seluruh dokumen perjalanan mereka sebagai langkah antisipasi.

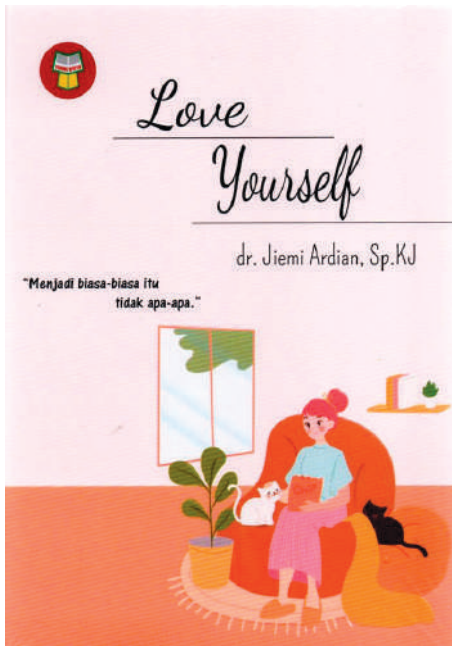
Sebagai penutup, Okky Aditya Yaqsa menekankan bahwa seluruh jajaran perwakilan pemerintah Indonesia di Arab Saudi senantiasa berupaya untuk me-

mastikan hak-hak warga negara tetap terlindungi di tengah badai geopolitik ini. Kepastian keamanan di Makkah dan Madinah diharapkan tetap menjadi komitmen internasional demi kelancaran ibadah umat Islam di seluruh dunia.

"Kami mengimbau jemaah dan penyelenggara [perjalanan] untuk selalu merujuk pada sumber informasi resmi dan tidak terprovokasi kabar yang belum terverifikasi. Dinamika di lapangan memang menuntut adaptasi teknis, tetapi semua itu semata-mata sebagai langkah mitigasi demi menjaga keselamatan setiap orang yang sedang bertamu di tanah suci," pungkasnya. ■

Peta Arab Saudi (ilustrasi) (Sumber: freepik.com)





Judul Buku : *Love Yourself: Menjadi Biasa-Biasa Itu Tidak Apa-Apa*
 Penulis : dr. Jiemi Ardian, Sp.KJ
 Penerbit : Yrama Widya
 Tahun Terbit : 2021
 Halaman : 256 halaman
 Genre : Pengembangan Diri, Kesehatan Mental

Refleksi *Love Yourself* bagi Insan Imigrasi: **BELA NEGARA DIMULAI DARI DIRI SENDIRI**

Mencintai diri sendiri bukanlah keegoisan, melainkan fondasi untuk berfungsi optimal dan berempati kepada sesama. Buku *Love Yourself* mengajak insan Imigrasi agar merawat diri sebagai wujud bela negara yang paling mendasar.

■ Penulis: Fipit Fatimah

Dokter spesialis kesehatan jiwa Jiemi Ardian menulis buku *Love Yourself: Menjadi Biasa-Biasa Itu Tidak*

Apa-Apa sebagai panduan praktis merawat kesehatan mental. Buku ini membongkar mitos bahwa “mencintai diri sendiri” adalah hal egois. Menurut Jiemi, cinta terhadap diri sendiri (*self-love*) adalah fondasi agar seseorang dapat berfungsi optimal, berempati, dan tidak mengalami kelelahan mental (*burnout*). Buku ini terbagi menjadi tiga bagian: mengenali diri, menerima diri, dan merawat diri.

(+) Kelebihan Buku

1. Ditulis oleh Seorang Ahli dengan Bahasa Awam
Buku ini bukan sekadar swabantu (*self-help*) bermodal motivasi. Jiemi memiliki spesialisasi pada bidang kejiwaan sehingga setiap saran berdasarkan referensi ilmiah, tetapi disampaikan tanpa istilah medis yang menyulitkan.
2. Sangat Aplikatif dan “Membumi”
Buku ini tidak meminta pembaca untuk sekadar berpikir positif. Terdapat latihan jurnal, cara mengatakan “tidak” tanpa rasa bersalah, serta panduan hygiene tidur. Bagi pegawai dengan jam kerja padat, bagian manajemen energi dan tidur sangat relevan.
3. Membongkar Stigma Kesehatan Mental

Jiemi menegaskan bahwa pergi ke psikolog atau psikiater bukan tanda kelemahan. Buku ini memuat daftar periksa gejala depresi, kecemasan, dan kelelahan mental yang bisa menjadi referensi berkonsultasi.

4. Validasi Emosi Tanpa Menghakimi
Buku ini tidak menyalahkan pembaca yang mudah stres. Jiemi menyatakan bahwa wajar merasa lelah jika bekerja berhadapan dengan, misalnya, pemohon paspor yang marah-marah sepanjang hari. Validasi ini menjadi pintu masuk untuk pulih.

(-) Kekurangan Buku

1. Contoh Kasus Cenderung Umum
Studi kasus sebagian besar berkisar pada masalah kantor, hubungan, dan keluarga muda. Belum ada contoh spesifik tekanan kerja di instansi penegak hukum atau bidang imigrasi.
2. Minim Pembahasan Trauma Kompleks
Buku ini berfokus pada stres sehari-hari dan perawatan diri tingkat ringan hingga menengah. Bagi pegawai yang mengalami peristiwa traumatis, buku ini belum memadai. Jiemi

menyarankan kasus berat tetap ditangani profesional.

3. Pengulangan di Beberapa Bagian
Pesan “Istirahat itu produktif” dan “Batasan itu sehat” diulang di beberapa bab, yang dapat terasa bertele-tele bagi sebagian pembaca.
4. Belum Menyentuh Aspek Spiritual
Buku ini murni dari sudut pandang psikologi klinis. Penggabungan dengan perspektif spiritual akan terasa lebih utuh bagi sebagian pembaca.

Dalam bekerja, pegawai Imigrasi harus tegas menegakkan aturan, tetapi juga ramah melayani. Tekanan ini nyata dihadapi. Buku Jiemi relevan karena dapat membantu mencegah kelelahan mental, mengelola cedera moral (*moral injury*), meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat integritas, dan membangun tim yang solid.

Buku ini sangat direkomendasikan untuk semua aparatur sipil negara (ASN), terutama yang bekerja di garis depan pelayanan publik. Bagi pegawai Imigrasi, membaca buku ini adalah bentuk bela negara yang dimulai dari diri sendiri. Selamat membaca. ■



PERSYARATAN PASPOR ANAK

Dokumen Persyaratan

- KTP elektronik ayah atau ibu
- Kartu keluarga
- Akta kelahiran
- Akta perkawinan atau buku nikah orang tua
- Paspor lama anak (untuk penggantian)
- Fotokopi paspor ayah atau ibu bagi yang memiliki



Jangan Lupa!

- Sediakan meterai Rp10.000.
- Kedua orang tua harus mendampingi saat pembuatan paspor.
- Serahkan surat pernyataan kedua orang tua yang menyatakan bertanggung jawab terhadap penggunaan paspor anak.



Informasi Penting

Bayi di bawah 5 tahun (balita) **tidak perlu mendaftar** di aplikasi M-Paspor.





Dirjen Imigrasi dalam konferensi pers penangkapan 3 WN Pakistan
(Foto: Dok. Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi)



Eks-penyidik KPK Novel Baswedan memberikan selamat kepada Dirjen Imigrasi yang baru dilantik. (Foto: Dok. Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi)



Dirjen Imigrasi asyik bercengkerama dengan pimp redaksi pada acara riung media. (Foto: Alfiqri Ans)

Berbagi makan siang gratis kepada masyarakat di samping gedung Ditjen Imigrasi (Foto: I Made Donik)



Proses pengambilan foto pemohon paspor balita pada acara Indonesia Tourism & Trade Investment Expo 2026 di Bali (Foto: Agung Kurniawan)



Panitia penyelenggara PREMAN yang digelar Kanim Pontianak pada April lalu (Foto: Arif Rahman Suryaman)



Peserta terbaik di kelas Komunikasi Digital sebagai Wajah Reputasi (Foto: Arif Rahman Suryaman)

HATI-HATI BERMEDIA SOSIAL



Perluas Jangkauan, Dekatkan Layanan

18 Kantor Imigrasi Baru Telah Hadir



Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1621/M.KT.01/2025 tanggal 4 November 2025



Global Citizen of Indonesia (GCI)

Join now and experience a seamless connection with Indonesia's future

Visit evisa.imigrasi.go.id for the information



**IMIGRASI
INDONESIA**
www.imigrasi.go.id